

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi April II Tahun 2022 No. 32

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari

Pimpinan Komisi I DPR

Kutuk Serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa



Mencintai Yang Dekat, Menyayangi yang Jauh.

Di tengah segala kompleksitas yang kita hadapi sebagai bangsa, tentu saja tidak serta merta menutup ruang kepedulian terhadap bangsa lain. Mencintai yang dekat, menyayangi yang jauh menjadi sangat relevan di tengah gonjang-ganjing tatanan dunia yang masih dirundung pandemi.

Bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Apa yang terjadi hari-hari ini di dalam pusaran konflik dunia, membuat kita prihatin

dan merasa sedih. Baik konflik yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia, apalagi penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dalam kurun waktu yang panjang. Ironisnya penindasan ini tidak berhenti di masa Ramadhan ini.

Kondisi dunia internasional yang terus bergejolak menjadi ujian kemampuan Indonesia dalam memimpin dan memberikan

solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Konflik dalam sejarahnya telah menimbulkan dampak yang luar biasa besar; nyawa, harta dan bahkan hilangnya sebuah bangsa. Ironisnya konflik yang terjadi di Palestina telah terjadi bertahun-tahun dan membuat penderitaan panjang bagi masyarakatnya. Tergusur dari negeri sendiri, diisolasi dalam beragam

pembatasan, dan tindakan yang sewenang-wenang.

Di tengah segala kompleksitas yang kita hadapi sebagai bangsa, tentu saja tidak serta merta menutup ruang kepedulian terhadap bangsa lain. Mencintai yang dekat, menyayangi yang jauh menjadi sangat relevan di tengah gonjang-ganjing tatanan dunia yang masih dirundung pandemi.

Kita mendorong Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam mencegah segala bentuk konflik dan pada saat bersamaan menghadirkan solusi yang komprehensif. Tentu tidak mudah dan butuh kekuatan.

Tapi jika sekadar berpangku tangan, maka sejatinya Indonesia sedang melepaskan diri dari kontribusi terhadap peradaban dunia.



Pimpinan Komisi 1 DPR RI FPKS **Kutuk** Serangan Israel Kedalam Masjid Al-Aqsa

KUTIPAN

Jakarta (16/04) --- Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras serangan polisi Israel yang kembali digencarkan ke Masjid Al Aqsa Palestina.

Serangan brutal yang dilakukan oleh Kepolisian Israel Kedalam Masjid yang mengakibatkan, ratusan warga Palestina terluka termasuk korbannya wartawan, tenaga medis hingga perempuan jamaah Masjid Al Aqsha.

"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengutuk kebiadaban, kekejaman negara apartheid Israel yang menodai kesucian bulan Ramadan dan Masjid Al-Aqsa kiblat pertama umat Islam," tegas Kharis dalam keterangan pers tertulis kepada media, Sabtu (16/04/2022).

Menurutnya, segala tindakan kebiadaban Israel tidak dapat dibenarkan sama

sekali, termasuk yang baru-baru ini terjadi dengan cara menyering jemaah di Masjid Al-Aqsa.

Selain itu, terjadi pula upaya sistematis untuk terus mengusur rumah warga Palestina di Tepi Barat dan ribuan kejahatan yang terus dilakukan Israel selama pendudukan di Palestina.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kharis meminta agar Kementerian Luar Negeri RI mengajukan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait langkah provokasi Israel tersebut.

"Dalam catatan DPR, sedikitnya terdapat 15 Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB terkait Yerusalem dan satu

resolusi penting Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah," sebutnya.

Namun, lebih dari lima dekade, menurut Kharis, resolusi-resolusi tersebut seperti tidak ada artinya bagi Israel.

"Indonesia bisa mengirimkan nota protes ke PBB sebagai negara anggota PBB dan juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan mayoritas umat Islam. Kita minta PBB agar melindungi rakyat Palestina dari kesewenangan rezim Zionis penjahat." tegasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini juga meminta agar Pemerintah Indonesia melakukan penggalangan dana bantuan untuk meringankan beban korban serangan Israel. Juga, mengimbau masyarakat Indonesia untuk memberi bantuan material dan spiritual melalui lembaga resmi kepada korban serangan Israel ini.

"Disamping amanah konstitusi memperjuangkan kemerdekaan Palestina, perlu langkah bersama menggalang solidaritas dan sebagai rakyat Indonesia kita harus membantu meringankan dan dengan segala daya upaya kita untuk menolong rakyat Palestina," tutup legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.



Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI

"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengutuk kebiadaban, kekejaman negara apartheid Israel yang menodai kesucian bulan Ramadan dan Masjid Al-Aqsa kiblat pertama umat Islam. segala tindakan kebiadaban Israel tidak dapat dibenarkan sama sekali, termasuk yang baru-baru ini terjadi dengan cara menyering jemaah salat di Masjid Al-Aqsa"

Perlu Tindakan Internasional

Lindungi Masjid Al-Aqsa

Polisi Israel melakukan serbuan ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dan melukai setidaknya 67 warga Palestina dalam kekerasan yang terjadi pada Jumat 15 April 2022



Jazuli: Israel tak Pernah Jera Injak Tindas Palestina

Agresi Israel menyerang jamaah yang sedang beribadah di tempat suci Masjidil Aqsa jelas di luar nalar kemanusiaan dan sungguh biadab. Tapi itulah Israel yang tidak pernah jera menginjak-injak hak asasi rakyat Palestina dan melanggar semua aturan negara beradab



Sukamta: Indonesia perlu lebih Pro Aktif

Saya kira dengan banyaknya kekerasan yang dilakukan tentara Israel di Masjid Al-Aqsa,

pemerintah Indonesia perlu lebih proaktif mengajak masyarakat internasional untuk menjadikan kompleks Masjid Al-Aqsa dibawah perlindungan internasional, ini untuk memastikan warga Palestina bisa lebih aman dan tenang dalam melaksanakan ibadah



Syahrul Aidi: Jangan Standar ganda

Tindakan Israel sudah keterlaluan. Satu sisi dia mengutuk serangan Rusia ke Ukraina, namun sisi lain dia sudah puluhan tahun menganeksasi wilayah Palestina dengan kekerasan. "Israel ini jadi benalu

bagi dunia. Selalu jadi pemantik berbagai konflik internasional. Kita semua harus tegas, negara seperti ini harus dihilangkan dari peta global"



Kharis: Kirim Nota Protes ke DK PBB

"Indonesia bisa mengirimkan nota protes ke PBB sebagai negara anggota PBB dan juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan mayoritas umat Islam. Kita minta PBB agar melindungi rakyat Palestina dari kesewenangan rezim Zionis penjajah

Fraksi PKS Kutuk Keras Serangan Israel ke Masjidil Aqsa, Dunia Internasional Harus Bersikap Tegas

KUTIPAN

Jazuli Juwaini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan agar rakyat Palestina diberikan perlindungan dan keselamatan serta diberikan kekuatan untuk melawan kezaliman dan kebidaban Israel.

Ketua Fraksi PKS mengutuk keras aksi biadab Israel menyerang jamaah umat Islam yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa pada Jumat (15/4).

Serangan brutal Israel tersebut, kata Jazuli Juwaini, melanggar tiga kesucian sekaligus, yaitu: melanggar kesucian tempat (Masjidil Aqsa), melanggar kesucian bulan (bulan suci ramadhan), dan melanggar kesucian HAM.

Dunia internasional diminta bersikap tegas untuk menghentikan kebidaban Israel tersebut apalagi hal itu terjadi di bulan suci Ramadhan dimana umat Islam Palestina semestinya mendapatkan hak asasinya untuk tenang dan

damai dalam beribadah ramadhan.

"Agresi Israel menyerang jamaah yang sedang beribadah di tempat suci Masjidil Aqsa jelas di luar nalar kemanusiaan dan sungguh biadab. Tapi itulah Israel yang tidak pernah jera menginjak-injak hak asasi rakyat Palestina dan melanggar semua aturan negara beradab," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil inisiatif internasional yang memaksa Israel menghentikan segala bentuk kekerasan kepada warga Palestina.

"Dunia internasional harus mengambil tindakan yang lebih

tegas kepada Israel karena aksi kekerasan tersebut akan memicu eskalasi konflik di wilayah Palestina baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza. Dipastikan akan lebih banyak lagi jatuh korban sipil di pihak Palestina," tandas Jazuli.

Jazuli Juwaini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan agar rakyat Palestina diberikan perlindungan dan keselamatan serta diberikan kekuatan untuk melawan kezaliman dan kebidaban Israel.

"Di bulan suci ramadhan ini mari kita kencangkan doa untuk rakyat Palestina agar Allah menjaga dan melindungi rakyat Palestina serta menghadirkan kedamaian dan kemerdekaan di bumi Palestina," seru Jazuli.

Dikabarkan akibat serangan brutal tersebut, lebih dari 150 orang rakyat Palestina luka-luka, puluhan mengalami luka serius dan kritis. Israel bahkan menahan dan menyerang paramedis serta menangkap ratusan warga Palestina dalam aksi brutal tersebut.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Dunia internasional harus mengambil tindakan yang lebih tegas kepada Israel karena aksi kekerasan tersebut akan memicu eskalasi konflik di wilayah Palestina baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza. Dipastikan akan lebih banyak lagi jatuh korban sipil di pihak Palestina"

Wakil Ketua FPKS: Perlu Tindakan Internasional untuk Lindungi Masjid Al-Aqsa

KUTIPAN

Yogyakarta (16/04) --- Polisi Israel melakukan serbuan ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dan melukai setidaknya 67 warga Palestina dalam kekerasan yang terjadi pada Jumat 15 April 2022.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta mengemukakan tindakan Israel yang melakukan serangan di kompleks Masjid Al-Aqsa.

Menurut Sukamta, kekerasan Israel di Masjid Al-Aqsa dikhawatirkan akan memicu konflik yang lebih besar sebagaimana kejadian tahun lalu.

"Serangan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa adalah tindakan keterlaluhan, ini jelas melanggar HAM dalam kebebasan beragama. Israel mestinya menghormati status quo Yerusalem dan kompleks Masjid Al-Aqsa. Saya kira dengan banyaknya kekerasan yang dilakukan tentara Israel di Masjid Al-Aqsa, pemerintah Indonesia perlu lebih proaktif mengajak masyarakat

internasional untuk menjadikan kompleks Masjid Al-Aqsa dibawah perlindungan internasional, ini untuk memastikan warga Palestina bisa lebih aman dan tenang dalam melaksanakan ibadah."

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti eskalasi kekerasan di Tepi Barat yang menewaskan belasan warga Palestina dan Israel dalam beberapa pekan terakhir.

Menurutnya akar masalah dari banyaknya kekerasan di wilayah Tepi Barat karena Israel secara terus menerus melakukan pengusuran rumah dan tanah warga Palestina untuk ditempati oleh pemukim ilegal Israel.

"Apa yang terjadi di Sheikh

Jarah dan Silwan dengan adanya pengusiran 218 keluarga Palestina merupakan gambaran nyata tindakan semena-mena Israel yang jelas-jelas melecehkan keputusan Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lembaga ini telah menetapkan Sheikh Jarrah dan Silwan sebagai bagian dari Palestina. Ini artinya Israel telah nyata melakukan pelanggaran hukum internasional. Berulang kali pelanggaran dilakukan oleh Israel tanpa adanya sanksi yang cukup ampuh dari PBB. Maka wajar kekerasan terus terjadi di Tepi Barat," ujar Sukamta.

Anggota DPR asal Yogyakarta ini lupa menyinggung banyaknya netizen yang membandingkan tindakan tegas PBB dan negara maju dalam menjatuhkan sanksi kepada Rusia, sementara terhadap Israel yang telah puluhan tahun menjajah Palestina tidak ada sanksi yang kuat.

"Saya kira wajar masyarakat dunia soroti hal itu. PBB dan komunitas internasional tentu sudah memahami tindakan



H. SUKAMTA, Ph.D.
Anggota Komisi I DPR RI

Apa yang terjadi di Sheikh Jarrah dan Silwan dengan adanya pengusiran 218 keluarga Palestina merupakan gambaran nyata tindakan semena-mena Israel yang jelas-jelas melecehkan keputusan Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lembaga ini telah menetapkan Sheikh Jarrah dan Silwan sebagai bagian dari Palestina

internasional yang tidak adil telah memicu konflik berkepanjangan di berbagai wilayah di dunia. Saya kira pemerintah Indonesia bisa mengambil peran sebagaimana

dulu sebagai penggagas gerakan non blok, untuk mendorong terbangunnya sistem internasional yang sejajar," pengkasnya Sukamta mengakhiri.



Kutuk Serangan Israel ke Masjid Al-Aqsha, GKSB Indonesia-Palestina: Negara Barat **Jangan Standar Ganda**

KUTIPAN

Jakarta (17/04) — Serangan tentara Israel ke Masjid al Aqsha pada Jumat (15/4/2022) sebelum fajar mendapat reaksi keras dari senayan. Serangan itu mengulang kebrutalan Israel ke Palestina puluhan tahun terakhir.

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Palestina DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat saat dihubungi pada Sabtu (16/4/2022) mengutuk serangan ke tempat suci tersebut. Dia meminta PBB bereaksi keras kepada Israel.

"GKSB DPR RI mengutuk serangan saat orang beribadah ke Masjid al Aqsha. Kejadian brutal dan melanggar HAM ini terus dipertontonkan oleh Israel ke mata internasional. Kita minta semua negara menyoroti hal ini, dan PBB segera bertindak untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina"

kata Syahrul Aidi.

Dia meminta khususnya negara-negara barat turut menyoroti hal ini. Jangan sampai negara barat menerapkan standar ganda. Jangan sampai mereka bereaksi keras atas konflik Rusia-Ukraina namun lemah terhadap negara lainnya, khususnya konflik Israel-Palestina.

"Kemudian kita juga meminta kepada pemerintah menggunakan forum-forum internasional baik di PBB, OKI, G-20 ataupun yang lainnya untuk mencari jalan keluar atas

semua konflik yang terjadi di Palestina." tegas Syahrul Aidi lagi.

Syahrul Aidi bahkan menilai tindakan Israel sudah keterlaluan. Satu sisi dia mengutuk serangan Rusia ke Ukraina, namun sisi lain dia sudah puluhan tahun menganekansi wilayah Palestina dengan kekerasan.

"Israel ini jadi benalu bagi dunia. Selalu jadi pemantik berbagai konflik internasional. Kita semua harus tegas, negara seperti ini harus dihilangkan dari peta global" tegasnya.

Serangan Israel ke Masjid al Aqsha kali ini menyebabkan 67 korban yang terluka. Disamping beberapa fasilitas di Masjid al Aqsha yang rusak. Hingga saat ini kondisi mencekam, kedua belah pihak siap siaga di sisi masing-masing.



**Dr. H. SYAHRUL AIDI
MAAZAT, Lc., M.A.**

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI

"GKSB DPR RI mengutuk serangan saat orang beribadah ke Masjid al Aqsha. Kejadian brutal dan melanggar HAM ini terus dipertontonkan oleh Israel ke mata internasional. Kita minta semua negara menyoroti hal ini, dan PBB segera bertindak untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina"

Fraksi PKS DPR RI



Kutuk Keras Serangan Israel ke Masjidil Aqsa



Agresi Israel menyerang jamaah yang sedang ber-ibadah di tempat suci Masjidil Aqsa jelas di luar nalar kemanusiaan dan sungguh biadab. Tapi itulah Israel yang tidak pernah jera menginjak-injak hak asasi rakyat Palestina dan melanggar semua aturan negara beradab

**Dr. H. JAZULI
JUWAINI, MA**
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Salim Segaf Doakan Keselamatan Indonesia di tengah Gejolak Nasional

KUTIPAN

Jakarta (12/04) --- Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf al-Jufri mencermati kondisi nasional yang sedang bergolak. Termasuk protes mahasiswa di berbagai daerah dan aktivis demokrasi yang menuntut penataan negara dikembalikan ke relnya, Pancasila dan UUD NRI 1945.

Untuk itu, Salim menyampaikan doa bagi keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

Doa itu dilantunkan saat Salim akan melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci dan mampir di Masjid Quba.

"Yaa Allah, jadikanlah negeri kami (Negara Kesatuan Republik Indonesia) penuh damai, aman, tenteram dan sejahtera. Yang selalu mendapat perlindungan dari-Mu. Berikan hidayah kepada para pemimpin bangsa untuk menuruskan niat dan tetap istiqamah dalam membangun negeri yang sama-sama kita cintai," ucap Salim didampingi Presiden PKS (Ahmad Syaikhul), Mahfudz Abdurrahman (Bendum) dan Jazuli Juwaini

(Ketua Fraksi PKS DPR RI).

Salim juga khawatir dengan potensi bentrokan yang mungkin terjadi dalam penyampaian pendapat. Padahal, niat mahasiswa bagus untuk mengawal demokrasi dan HAM.

"Jauhkan bangsa dan negara kami dari segala bala dan musibah. Berikan saudara-saudara kami (yang sedang berjuang) di negeri tercinta taufik dan hidayah-Mu. Berikan kesejahteraan dan keamanan di bulan Ramadhan yang mulia ini. Berikan kekuatan, persatuan, dan kekokohan dalam membangun negeri dan meluruskan penyimpangan yang terjadi," seru Salim yang diaminakan para jamaah yang baru melaksanakan shalat

sunnah di Masjid Quba.

Salim berharap agar Indonesia terhindar dari perpecahan dan semakin sejahtera.

"Yaa Allah Yang Mahamulia dan Mahaperkasa, jauhkan bangsa kami dari gejala keretakan sosial-politik.

Angkatlah kesejahteraan dari saudara-saudara kami yang kesulitan. Sungguh banyak saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dan kesukahan hidup sehari-hari. Berikan mereka pekerjaan dan upah yang layak," doa mantan Menteri Sosial itu dengan liris dan mengharukan.

Khusus kepada kaum muda dan rakyat jelata, Salim mendoakan: "Bagi mereka yang sedang menuntut ilmu (para mahasiswa dan pelajar) mudahkan mereka untuk menyerap ilmu dan menerapkannya. Mereka yang sedang mengalami kesulitan (akibat kenaikan harga kebutuhan pokok), berikanlah jalan keluar."

Sebagai penutup, Salim menadaskan sikap waspada terhadap segala provokasi.

"Bagi mereka yang



Dr. SALIM
Ketua Majelis Syura PKS

"Ya Allah. Jauhkan bangsa dan negara kami dari segala bala dan musibah. Berikan saudara-saudara kami (yang sedang berjuang) di negeri tercinta taufik dan hidayah-Mu. Berikan kesejahteraan dan keamanan di bulan Ramadhan yang mulia ini. Berikan kekuatan, persatuan, dan kekokohan dalam membangun negeri dan meluruskan penyimpangan yang terjadi,"

memiliki niat buruk bagi bangsa kami, Yaa Allah, luruskan motivasinya dan cegahlah agar tidak menimbulkan keburukan. Terimalah ibadah kami, puasa

dan shalat kami, sedekah dan zakat kami. Ridhailah segala pengorbanan bangsa kami," Salim mengakhiri.

Fraksi PKS : Pengesahan RUU TPKS **Harus Segera** Diikuti RUU KUHP Agar Kuat dan Komprehensif

KUTIPAN

Jakarta (14/04) --- Paripurna DPR RI pada Selasa (12/4) mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Dari sembilan Fraksi di DPR hanya Fraksi PKS yang menolak pengesahan tersebut.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini penolakan Fraksi PKS semata-mata untuk mengingatkan DPR bahwa sebenarnya terdapat semangat dan momentum untuk mengatur tindak pidana kesesialan secara lengkap dan komprehensif di dalam RUU KUHP. Dan hal tersebut sesuai dengan Nomor Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.

Dalam Pertimbangan Hukumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa diperlukan langkah perbaikan untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Kesesialan oleh Pembentuk Undang-undang.

Menurut Jazuli Juwaini, dengan disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang kita kehilangan momentum untuk mendapatkan pengaturan komprehensif tentang tindak pidana kesesialan. Selain itu celah multitafsir masih terjadi atas perilaku asusila yang dilakukan tanpa paksaan dan kekerasan seperti seks bebas dan menyimpang.

"Fraksi PKS berpandangan mengeluarkan tindak pidana kekerasan seksual dari kerangka komprehensif pembahasan tindak pidana kesesialan berpotensi menimbulkan multitafsir pada aspek delik pidanaannya sebagaimana polemik yang

terjadi saat ini. Hal ini menyebabkan pengaturan yang parsial dan melemahkan upaya pencegahan dan penindakan segala jenis tindak pidana kesesialan yang meresahkan dan mengancam masyarakat," ungkap Jazuli.

Fraksi PKS mengingatkan bahwa sampai saat ini DPR bersama Pemerintah punya PR untuk melengkapi dan memperbaiki pasal-pasal yang mengatur tindak pidana kesesialan sebagaimana Putusan MK, yaitu meliputi kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual.

"Sejatinia kami ingin agar pembahasan RUU TPKS dilakukan secara paralel dengan pasal-pasal tindak pidana kesesialan dalam RUU KUHP sehingga lebih utuh, lengkap, integral serta tidak tumpang tindih (overleaping) sekaligus, yang paling penting, tidak menimbulkan pemaknaan lain yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945," terang Jazuli.

Sampai saat ini kita belum memiliki rumusan Tindak Pidana Kesesialan yang



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Sejatinia kami ingin agar pembahasan RUU TPKS dilakukan secara paralel dengan pasal-pasal tindak pidana kesesialan dalam RUU KUHP sehingga lebih utuh, lengkap, integral serta tidak tumpang tindih (overleaping) sekaligus, yang paling penting, tidak menimbulkan pemaknaan lain yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

komprehensif dan RUU KUHP berusaha merumuskan hal itu.

"Namun karena RUU TPKS sudah sah menjadi undang-undang, Fraksi PKS mendesak agar RUU KUHP segera dibahas dan disahkan sehingga upaya pencegahan dan penindakan

semua bentuk tindak pidana kesesialan seperti perzinahan dan seks menyimpang yang mengkhawatirkan dan mengancam masyarakat bisa dilakukan dengan efektif," pungkas Jazuli.



Dr. Salim : Elit Politik **Harus Belajar** dari Muhammad Natsir dalam Menjaga Integrasi Nasional

KUTIPAN

Jakarta (05/04) --- Fraksi PKS DPR RI kembali menggelar acara Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Edisi Spesial Peringatan Mosi Integral Muhammad Natsir 3 April 1950 dengan Tema 'Spirit Transformasi dan Kolaborasi Dalam Menjaga Integrasi Nasional' pada Senin (04/04/2022).

Tampil sebagai narasumber Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra, Ketua Umum DDII Adian Husaini, dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Sambutan disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dan dibuka secara resmi oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri.

Salim Segaf dalam keynote speech-nya menyebut Muhammad Natsir sebagai tokoh pemersatu bangsa yang mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia Serikat bentukan Belanda ke pangkuan NKRI.

MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN
MEMPERINGATI MOSI INTEGRAL NATSIR 3 APRIL 1950
Spirit Transformasi dan Kolaborasi dalam Menjaga Integrasi Nasional

Menurut Salim, elit politik hari ini harus belajar dari Muhammad Natsir bagaimana mencari titik temu kebangsaan di tengah tantangan dan ancaman disintegrasi nasional. "Ada empat pelajaran penting dari sosok Muhammad Natsir. Pertama, Natsir punya jiwa dan pikiran besar untuk Indonesia, visioner, dan melampaui problematika bangsanya.

Bangsa ini bangsa besar. Butuh konsepsi besar untuk menjaga keutuhannya," ujar Menteri Sosial RI 2009-2014.

Kedua, kejelian Muhammad Natsir dalam menemukan dan membangun titik temu kebangsaan. Beliau adalah seorang tokoh politik yang cerdas, santun dan elegan, pandai berkomunikasi dan jago lobi dalam urusan urusan kebangsaan sehingga mampu menyatukan NKRI dengan Mosi Integralnya.

"Natsir yang Tokoh Partai Islam Masyumi menegaskan tidak ada dikotomi bahkan tidak ada jarak antara agama dan nasionalisme. Baginya menjadi nasionalis berarti harus agamis. Sebaliknya, menjadi agamis berarti harus nasionalis. Tidak ada perdebatan," tandas Salim.

Ketiga, Muhammad Natsir mempraktekkan politik alihudung atau high politic, bukan politik pragmatis apalagi oportunis.

"Siapaun kita terutama pejabat publik dari partai dan golongan manapun, tampilkan politik yang menjunjung tinggi etika dan moralitas yang



Dr. SALIM
Ketua Majelis Syuro PKS

"Kita butuh pemimpin yang negarawan, yang taat konstitusi dan Pancasila, yang aktif membangun kohesi sosial, aktif melakukan transformasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa, memiliki rasa empati dan kepedulian serta terus menggalang solidaritas sosial nasional"

berlandaskan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Sifat-sifat ambisius dan oportunistik dalam berpolitik yang akan merusak demokrasi dan menghancurkan kohesi sosial dan integrasi nasional kita," ungkapnya.

Keempat, menurut mantan Dubes RI di Arab Saudi ini,

relevan dengan tema, Muhammad Natsir adalah tokoh yang mencontohkan semangat transformasi dan kolaborasi dalam membangun bangsa.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Azyumardi Azra: Revitalisasi Mosi Integral Diperlukan Dalam Hadapi Tantangan Bangsa

KUTIPAN

Jakarta (04/04) --- Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menjadi narasumber pada webinar yang diadakan oleh Fraksi PKS DPR RI, bertajuk 'Spirit Transformasi dan Kolaborasi Dalam Menjaga Integrasi Nasional', Senin (04/04).

Dalam Webinar peringatan Mosi Integral Natsir tersebut, mengawali pemaparan Azyumardi menyampaikan bahwa umat muslim punya tanggungjawab besar menjaga integrasi nasional.

"Kaum muslimin menjadi mayoritas di Indonesia, sehingga umat muslim punya tanggungjawab besar menjaga integrasi nasional, Integrasi NKRI. Sebaliknya, umat Islam Indonesia yang begitu banyak tidak bisa menjaga integrasi, maka tentu ini tidak baik bagi NKRI", terang Azyumardi.

Dalam pemaparan lanjutan, Azra menyarankan untuk dilakukan Revitalisasi Mosi Integral Natsir, sebab ada dua hal tantangan yang

MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN
**MEMPERINGATI
MOSI INTEGRAL
NATSIR 3 APRIL 1950**

Spirit Transformasi dan Kolaborasi dalam Menjaga Integrasi Nasional

dihadapi bangsa Indonesia.

"Saya menyarankan perlunya revitalisasi Mosi Integral Natsir, sebab ada dua hal tantangan yang dihadapi saat ini dan kedepannya," pungkasnya.

Pertama, imbuh Azra, ada perkembangan politik yang tidak terlalu kondusif di tanah air serta munculnya friksi-friksi dan perbedaan yang semakin susah untuk dijembatani.

"Kedua, masih adanya gejala dan tendensi

separatisme. Hampir setiap pekan selalu ada aparat yang tewas akibat kelompok separatisme. Tentu ini tidak baik bagi ketahanan integrasi NKRI. Ini harus segera diselesaikan", jelasnya.

Terakhir, Azyumardi menyampaikan pentingnya Integrasi Islam dimasa kini yakni hadirnya Legacy Ormas di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bernegara.

"Legacy ormas bercakupan Nasional sebagai Jam'iyah, termasuk Partai. PKS cakupannya nation light dan menyatukan diantara PKS yang ada di Aceh dan di Papua atau di Maluku dan seterusnya. Begitu juga dengan ormas nonpolitik memainkan peran sebagai civil society berperan dalam civil culture, demokrasi juga check and balances", tutup Azyumardi.



**Prof. Dr. AZYUMARDI
AZRA, M.A. CBE**
Cendekiawan Muslim

"Kaum muslimin menjadi mayoritas di Indonesia, sehingga umat muslim punya tanggungjawab besar menjaga integrasi nasional, Integrasi NKRI. Sebaliknya, umat Islam Indonesia yang begitu banyak tidak bisa menjaga integrasi, maka tentu ini tidak baik bagi NKRI", terang Azyumardi"

Gubernur Lemhanas: Pemahaman Geopolitik **Penting** Kokohkan Integrasi Nasional

KUTIPAN

Jakarta (04/04) --- Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto, memberikan materi terkait perspektif geopolitik dalam upaya meneguhkan integrasi nasional pada acara Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Seri ke-7 edisi spesial peringatan mosi integral M. Natsir 3 April 1950

dengan tema "Spirit Transformasi dan Kolaborasi Dalam Menjaga Integrasi Nasional", Senin siang (04/04).

Andi memulai paparannya dengan terlebih dahulu membahas evolusi panjang integrasi nasional dari tahun 1945 sampai saat ini, termasuk menyinggung soal Mosi Integrasi Natsir.

"Ketika Sidang BPUPKI, misalnya, Soepomo menawarkan gagasan negara integralistik. Seiring waktu, Natsir pun menawarkan mosi integral di tahun 1950, yang oleh Bung Hatta yang disebut sebagai proklamasi kedua. Mosi ini mengkritik bentuk negara serikat, negara federal, hingga

MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN
**MEMPERINGATI
MOSI INTEGRAL
NATSIR 3 APRIL 1950**

1 Spirit Transformasi dan Kolaborasi dalam Menjaga Integrasi Nasional

akhirnya terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia", jelas Andi.

Lebih lanjut, dalam situasi kontemporer, integrasi nasional harus dikaitkan dengan konteks politik dan ekonomi global.

"Yang harus kita antisipasi kedepan, pada dasarnya ialah soal pemahaman geopolitik. Tentunya, kita Indonesia, tidak memiliki pemahaman geopolitik yang sifatnya penguasaan dunia seperti negara super power,

pemahaman geopolitik kita berdasarkan negara kepulauan dan wawasan nusantara yang sifatnya bukan ekspansionis global untuk menguasai titik-titik di luar kedaulatan teritorial kita", ucap Andi.

Andi melanjutkan, dalam perspektif geopolitik, Indonesia memiliki posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua. Namun, hal ini jika tidak dimanfaatkan dengan baik, imbuhan Andi, justru akan menjelma menjadi kerawanan strategis.

"Terutama ketika Indonesia tidak memiliki kemampuan melakukan proyeksi kekuatan melindungi letak geografi yang berada diantara pertarungan-pertarungan kekuatan besar di Asia Timur, Asia Pasifik, sampai kepada Samudra Hindia", terang Andi melanjutkan.

Oleh sebab itu, jelas Andi, Lemhanas saat ini sedang mengembangkan kepemimpinan strategis berbasis kepada Ketahanan Nasional.

"Pertama, mengembangkan kepemimpinan berdasarkan ketahanan nasional. Ini mengandalkan berlangsungnya



ANDI WIDJAJANTO, M.Sc
Gubernur Lemhanas

"Yang harus kita antisipasi kedepan, pada dasarnya ialah soal pemahaman geopolitik. Tentunya, kita Indonesia, tidak memiliki pemahaman geopolitik yang sifatnya penguasaan dunia seperti negara super power, pemahaman geopolitik kita berdasarkan negara kepulauan dan wawasan nusantara yang sifatnya bukan ekspansionis global untuk menguasai titik-titik di luar kedaulatan teritorial kita"

lima pilar. Pilar tata kelola, manajemen resiko, manajemen krisis, pemulihan cepat, dan berkelanjutan. Kelima pilar tersebut memiliki komponen struktural antara lain, regulasi,

kerangka institusi, gelar operasional, alokasi sumber daya, dan adopsi teknologi" sambung Andi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Peringati Mosi Integral Natsir

HNW: **Kembalikan** Cita-Cita NKRI Sesuai Amanat Konstitusi

● KUTIPAN

Jakarta (04/04) — Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menyampaikan pandangannya dari sisi MPR RI dalam Memperingati Mosi Integral Natsir, saat mengisi kegiatan di Mimbar Demokrasi Kebangsaan, Senin (04/04).

Dalam pandangannya, NKRI sebagai salah satu empat pilar kebangsaan, memang sudah menjadi bagian penting dalam program MPR untuk terus di sosialisasikan agar terus diinternalisasikan, dijaga, diselamatkan, dan dikembangkan menjadi cita-cita besar Indonesia merdeka.

Meski demikian, di tengah-tengah ikhtiar dan semangat meneriakkan 'NKRI Harga Mati,' HNW menyayangkan tidak hadirnya satu spirit dari nilai NKRI itu bisa tergaah agar tidak mati. Sebab fenomena saat ini pembelahan di masya-

MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN
**MEMPERINGATI
MOSI INTEGRAL
NATSIR** 3 APRIL 1950

↳ Spirit Transformasi dan Kolaborasi dalam Menjaga Integrasi Nasional

rakat masih saja terus terjadi.

"Karena disaat bersamaan masih dibiarkan banyak terjadinya pembelahan, bahkan ungkapan-ungkapan yang menggambarkan bahwa seolah-olah kita tidak ingin hidup bersama dalam satu bangsa dan satu negara. Maka, pada titik inilah mosi integral M. Natsir menjadi sangat krusial" ungkapnya secara virtual.

Secara lebih lanjut, HNW turut menyamakan kondisi yang terjadi antara PKS dan Partai Masyumi dari M. Natsir di Parlemen yang komposisi jumlahnya tidak banyak dibandingkan partai-partai lain, namun tetap bisa menghasilkan kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh anggota parlemen saat itu.

"Beliau (M. Natsir) sebagai representasi dari Masyumi berhasil menghadirkan sebuah terobosan dengan kepiawaiannya untuk menggalang seluruh kekuatan politik di parlemen melalui lobby politik. Sehingga mendapatkan dukungan seluruh kalangan politik yang ada di DPR RIS. Sekalipun di parlemen sangat kecil jumlahnya, yaitu 49 anggota dari total keseluruhan anggota 236. Disaat bersamaan ada 82 mosi lain yang pernah diajukan. Namun yang diterima ialah mosi integral M. Natsir," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

HNW mengungkapkan bahwa keberhasilan mosi integral M. Natsir bisa lolos di parlemen secara aklamasi yang didukung 12 anggota DPR RIS untuk diandatangani, bahkan mendapat dukungan dari Partai Kristen Indonesia dan PKI merupakan suatu hal yang luar biasa.

"Ini merupakan suatu prestasi yang sangat layak untuk selalu direvitalisasi, hingga kemudian hadirlah pemahaman utuh di bangsa kita ini tentang keindonesiaan kita yang hadir melalui perjuangan yang demikian

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

"Konstitusi kita sudah jelas, membatasi masa jabatan presiden selama maksimal dua periode dan pemilu setiap lima tahun sekali. Akhirnya, dengan kembali pada konstitusi inilah yang kemudian menyelamatkan Indonesia dan menjadi NKRI, dan dari NKRI ini dunia mengakui Indonesia, PBB mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat

cerdas, berani, tangguh, tangkas, dan ikhlas yang sekaligus berkeengarawan. Sebagaimana yang dilakukan Natsir bisa bertemu siapa saja, diterima siapa saja, sampai bisa saling berkomunikasi, saling memberikan kontribusikan, tanpa lagi mempertimbangkan

latar belakang agama, suku, partai politik, semua beratu padu untuk menyelamatkan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan Indonesia merdeka," tandasnya. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Peringatan Mosi Integral, Ketua DDII: Sosok M. Natsir **Patut Diteladani** Pemimpin Bangsa

KUTIPAN

Jakarta (04/04) --- Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Adian Husaini, hadir sebagai salah satu pembicara dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan 'Memperingati Mosi Integral Natsir', Senin (04/04).

Dalam acara tersebut, Adian Husaini dengan lugas memaparkan keteladanan dari sosok M.Natsir, mulai dari bagaimana pemikirannya dan kepiawaiannya dalam berkomunikasi.

"Beliau dalam mencari titik temu untuk kepentingan bersama itu sangat luar biasa", ujarnya.

Selain itu, ia juga merincikan sikap dan pandangan M. Natsir yang seharusnya dapat hadir juga dalam konteks kepemimpinan Indonesia saat ini, saat negara dan bangsa sedang menghadapi potensi

MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN
MEMPERINGATI MOSI INTEGRAL NATSIR 3 APRIL 1950
Spirit Transformasi dan Kolaborasi dalam Menjaga Integrasi Nasional

pecah belah dan disintegrasi bangsa.

"Inilah yang saya kira tradisi dialog, tradisi berfikir, tradisi mencari titik temu untuk kepentingan bersama, secara ilmiah ini ditunjukkan termasuk dalam Mosi Integral Moh. Natsir, dan ini perlu diteladani oleh seluruh anak bangsa, khususnya para pemimpin kita",

ucapnya lagi.

Ketua DDII ini pun menyinggung kepiawaian M. Natsir dalam mengintegrasikan antara keislaman dengan keindonesiaan, yang menurutnya pula, tak seharusnya dipertentangkan.

"Kami memandang bahwa contoh teladan dari pemikiran dan aktivitas kenegaraan dari M. Natsir ini merupakan bukti bahwa umat Islam sebenarnya tidak mengalami problem untuk mensintesis antara kislaman dan Keindonesiaan. Keduanya dapat berjalan beriringan dan tidak bisa dipisahkan", pungkasnya.



Dr. H. ADIAN HUSAINI, M.Si
Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

"Kami memandang bahwa contoh teladan dari pemikiran dan aktivitas kenegaraan dari M. Natsir ini merupakan bukti bahwa umat Islam sebenarnya tidak mengalami problem untuk mensintesis antara kislaman dan Keindonesiaan. Keduanya dapat berjalan beriringan dan tidak bisa dipisahkan"



Gelar Peringatan Mosi Integral

Ketua FPKS: Bentuk Komitmen PKS Kokohkan Nilai Kebangsaan

KUTIPAN

Jakarta (04/04) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyampaikan arahnya terkait nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan saat memberikan sambutan dalam sebuah forum bertajuk Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI Edisi Ke-7 Spesial Peringatan Mosi Integral M. Natsir, Senin, (04/04).

Ketua Fraksi PKS ini membuka arahnya dengan urgensi peringatan mosi integral M. Natsir pada setiap tanggal 3 April.

Menurut Jazuli, peringatan Mosi Integral adalah momentum yang sangat penting mengembalikan Indonesia serikat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimana, imbuhnya, NKRI ini sudah ditetapkan menjadi pilar penting oleh MPR, selain Pancasila, Konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kami Fraksi PKS sengaja secara rutin memperingati mosi integral M. Natsir. Tentu ini

MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN **MEMPERINGATI MOSI INTEGRAL NATSIR** 3 APRIL 1950

Spirit Transformasi dan Kolaborasi dalam Menjaga Integrasi Nasional

menjadi komitmen kami keluarga besar Fraksi PKS untuk terus mengkokohkan nilai-nilai kebangsaan dan untuk terus menjaga nilai-nilai kenegaraan Indonesia", paparnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR RI ini memaparkan beberapa program yang dijalankan oleh Fraksi PKS DPR RI sebagai bukti keseriusan Fraksi dalam menanamkan

nilai-nilai kebangsaan dalam benak masyarakat Indonesia.

"Banyak hal yang kami lakukan di FPKS, yaitu lomba baca teks proklamasi mirip suara Bung Karno setiap momentum meperingati 17 agustus. Guna memperingati hari pahlawan Nasional, kami Lomba pidato dan membaca biografi tokoh-tokoh besar bangsa. kami terus berupaya untuk menyajikan nilai-nilai kebangsaan dengan berbagai macam forum yang kami programkan" tambahnya.

Politisi Senior Fraksi PKS ini berpandangan bahwa program-program yang telah diadakan ini adalah bagian komitmen keluarga Fraksi PKS untuk menjaga originalitas nilai-nilai sejarah. Karena bangsa yang besar adalah yang bangsa yang bisa menghormati perjaanan bangsa.

"Kami Fraksi PKS menginginkan tidak boleh ada putus mata rantai sejarah perjalanan bangsa ini. Mata rantai itu harus tetap kokoh agar generasi berikutnya dapat mempelelari dan meneladaninya secara baik, bagaimana pengorbana



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Kami Fraksi PKS menginginkan tidak boleh ada putus mata rantai sejarah perjalanan bangsa ini. Mata rantai itu harus tetap kokoh agar generasi berikutnya dapat mempelajari dan meneladaninya secara baik, bagaimana pengorbana para pahlawan bangsa ini"

para pahlawan bangsa ini", tegasnya.

Selain itu, Anggota DPR RI Dapil Banten I ini juga menyoroti kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat sebagai salah satu alasan pentingnya nilai-nilai kebangsaan ini digaungkan di tengah masyarakat Indonesia.

"Kami melihat di era

revolusi teknologi digital saat ini di mana akses informasi sangat terbuka, dunia menjadi kecil, pemikiran-pemikiran bisa diakses. Karena itu perlu membentengi nilai-nilai kebangsaan, dasar negara, dan konstitusi kepada seluruh anak bangsa", ucapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Fraksi PKS Peringati Mosi Integral 3 April

Habib Salim: Sosok Moh. Natsir Perlu Diteladani

KUTIPAN

Jakarta (04/04) – Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Salim Segaf Al-Jufri, memberikan kata sambutan dalam acara Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan F-PKS Seri ke-7 Edisi Spesial

Peringatan Mosi Integral M. Natsir 3 April 1950 dengan tema “Spirit Transformasi dan Kolaborasi dalam Menjaga Kerjasama dan Menjaga Integrasi Nasional” yang disiarkan secara langsung melalui Youtube PKSTV, pada Senin (04/04/2022), siang.

Dalam sambutannya, sosok yang dikenal sebagai Habib Salim tersebut mengingatkan tentang pentingnya merawat ingatan bangsa terkait peristiwa Mosi Integral sebagai satu momentum sejarah saat kembali bersatunya wilayah-wilayah NKRI yang sempat terpisah akibat adanya Republik Indonesia Serikat (RIS).

“Salah satu nama yang punya jasa besar bagi cikal bakal NKRI yaitu Muhammad Natsir. Mosi Integral Natsir pada tanggal 3 April 1950, menjadi momentum bersatunya kembali negara bagian Republik

MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN
**MEMPERINGATI
MOSI INTEGRAL
NATSIR** 3 APRIL 1950

Spirit Transformasi dan Kolaborasi dalam Menjaga Integrasi Nasional

Indonesia Serikat kepada NKRI. Maka tak berlebihan ketika Bung Hatta menyebutkan bahwa Proklamasi Kedua diumumkan secara resmi pada 17 Agustus 1950 setelah Indonesia akhirnya kembali kepada cita-cita negara kesatuan dan tidak tercabik-cabik menjadi negara serikat buatan Belanda”, ujar Salim Segaf pada kata sambutannya.

Mantan Menteri Sosial Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini menjelaskan bahwa sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu tokoh-tokoh yang memiliki jiwa dan pikiran seperti Muhammad Natsir, yaitu tokoh

yang akan menghasilkan konsepsi yang besar untuk menjaga keutuhan negara ini.

“Muhammad Natsir merupakan seorang tokoh politik yang cerdas, santun dan elegan, pandai berkomunikasi dan jago lobi dalam urusan-urusan kebangsaan, seperti upayanya dalam menyelesaikan Mosi Integral di Parlemen RIS tersebut. Mosi ini disusun dengan rapi, penuh perhitungan dan strategi”, ungkapnya.

Habib Salim juga mengingatkan bahwa Muhammad Natsir sebagai sosok yang berasal dari Partai Islam Masyumi, ia adalah seorang nasionalis sejati sekaligus menegaskan bahwa tidak ada dikotomi bahkan tidak ada jarak antara agama dan nasionalisme. Baginya menjadi nasionalis berarti harus agamis. Sebaliknya, menjadi agamis berarti harus nasionalis.

“Pada kondisi saat ini, dengan tantangan yang semakin kompleks, kita butuh pemimpin yang negarawan, yang taat konstitusi dan Pancasila yang aktif membangun kohesi sosial, aktif melakukan transformasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa, memiliki rasa empati dan kepedulian serta



Dr. SALIM
Ketua Majelis Syuro PKS

“Muhammad Natsir merupakan seorang tokoh politik yang cerdas, santun dan elegan, pandai berkomunikasi dan jago lobi dalam urusan-urusan kebangsaan, seperti upayanya dalam menyelesaikan Mosi Integral di Parlemen RIS tersebut. Mosi ini disusun dengan rapi, penuh perhitungan dan strategi”

terus menggalang solidaritas sosial nasional, seperti Muhammad Natsir”, ucap Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan Oman pada tanggal 2005 sampai 2009 ini.

Sebagai penutup, Habib Salim juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam acara

ini, kepada seluruh narasumber dan seluruh peserta. Ia berharap dengan adanya acara ini dapat menjadi pengingat bagi kita tentang hakikat dan makna perjuangan, sehingga kita mampu meneladani dan melanjutkan estafet perjuangan mereka.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Fraksi PKS DPR RI Sebut Pemerintah **Paling Membutuhkan RUU Perlindungan Data Pribadi**

KUTIPAN

Jakarta (09/04) --- Anggota Komisi 1 DPR RI dari FPKS, Sukamta menyatakan bahwa pemerintah sebagai pihak yang paling membutuhkan perlindungan data pribadi.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mayoritas korban data breach adalah pemerintah. Terdapat 60 kali pelanggaran data breach dilakukan oleh pemerintah sedangkan dari penegak hukum dan energi masing-masing 5 kasus, keuangan 4 kasus.

"Pelanggaran data breach ini memperkuat argumen, jika Otoritas Pengawas Perlindungan Data dilakukan oleh Pemerintah tidak akan mungkin efektif berlaku. Artinya dibalik keinginan pemerintah agar lembaga pengawas data pribadi berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak bisa berjalan efektif," ungkap Sukamta.

Pelanggaran sebagian besar, kata Sukamta, berasal dari faktor internal termasuk kelalaian, sedangkan faktor eksternalnya akibat

penggunaan kredensial yang lemah, sistem rentan diretas, adanya serangan malware, dan kemungkinan adanya serangan yang menargetkan mitra bisnis.

Sukamta kembali mengingatkan pemerintah bahwa RUU PDP ini sangat krusial untuk segera diselesaikan agar bisa segera memberikan manfaat dan perlindungan kepada rakyat Indonesia.

"RUU PDP ini selain melindungi data pribadi, juga berhubungan dengan optimalisasi potensi digital Indonesia yang diperkirakan AlphaBeta pada tahun 2030 mencapai USD 160,8 miliar. Potensi ekonomi besar ini seharusnya memberikan dampak ekonomi dan memberikan rasa aman bagi rakyat Indonesia, bukan menguntungkan pihak asing.

Ketiadaan UU yang mengatur soal perlindungan data dan data pribadi, hanya akan menguntungkan pelaku eksploitasi oleh berbagai pihak. Sementara ini, pelaku bisnis digital masih didominasi pelaku pelaku bisnis luar negeri.

Mestinya Negara memberikan perlindungan maksimal kepada dunia digital dan khususnya data data digital rakyat Indonesia. Mestinya Pemerintah sangat berkepentingan agar RUU PDP segera disahkan."

Sebagai informasi data breach atau pelanggaran data adalah insiden keamanan di mana informasi diakses tanpa adanya otorisasi. Pelanggaran data dapat merugikan bisnis dan konsumen dalam berbagai aspek.

"Secara teknis, mirip dengan security breach atau pelanggaran keamanan, tapi berbeda tujuan. Security breach hanyalah pembobolan, sedangkan data breach adalah aktivitas mencuri informasi," tutup Sukamta.



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

"Pelanggaran data breach ini memperkuat argumen, jika Otoritas Pengawas Perlindungan Data dilakukan oleh Pemerintah tidak akan mungkin efektif berlaku. Artinya dibalik keinginan pemerintah agar lembaga pengawas data pribadi berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak bisa berjalan efektif,"



Temui BEM SI, Habib Aboe Apresiasi Kapolri yang Beri Jaminan Kebebasan Berekspresi

KUTIPAN

Jakarta (12/04) --- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyie mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui massa aksi di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022) kemarin.

Listyo menemui mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menyampaikan aspirasinya terkait penolakan perpanjang masa bakti Presiden RI.

"Saya salut dan menyampaikan apresiasi yang tinggi pada Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Statemen Pak Kapolri Sigit saat menemui pengunjung rasa dari BEM SI kemarin harus dicermati seluruh jajaran Polri," kata Habib Aboe pada wawancara Lintas Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Menurut Habib Aboe, dengan hadirnya Kapolri Sigit di tengah massa aksi menunjukkan bahwa polisi memberi kebebasan pada masyarakat Indonesia

menyampaikan pendapat di hadapan umum yang dijamin oleh konstitusi negara.

"Beliau memberikan jaminan bahwa Polri mendukung kebebasan berekspresi dan berdemokrasi. Apa yang Kapolri sampaikan ini adalah semangat dari Konstitusi kita untuk memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh warga Indonesia," jelas Ketua MKD DPR RI ini.

Politisi Asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan ini meminta seluruh jajaran kepolisian mentaati intruksi Kapolri tersebut. Ia berharap, aparat kepolisian bertindak di lapangan sesuai dengan arahan Kapolri Sigit.

"Apa yang disampaikan

oleh Kapolri itu harus dipedomani oleh segenap jajaran aparatur Kepolisian yang sedang bertugas di lapangan. Sehingga tidak ada langkah yang dilihat menghalangi setiap aksi penyampaian pendapat," terang Habib Aboe.

"Apalagi Kapolri sudah memberikan jaminan akan mengawal proses aksi unjuk rasa, ini adalah komitmen Kapolri untuk mengamankan aksi dengan pendekatan persuasif. Hal itu harus ditindaklanjuti dengan baik oleh setiap personel di lapangan," sambung Anggota Komisi III DPR RI ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolri Sigit ikut menemui mahasiswa bersama Pimpinan DPR RI saat menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI. Saat itu, Kapolri Listyo di atas mobil komando peserta aksi menyampaikan dukungan kepada jalannya proses demokrasi serta menyampaikan kebebasan menyampaikan pendapat atau aspirasi.

"Kita sangat mendukung terkait kebebasan demokrasi.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

"Apa yang disampaikan oleh Kapolri itu harus dipedomani oleh segenap jajaran aparatur Kepolisian yang sedang bertugas di lapangan. Sehingga tidak ada langkah yang dilihat menghalangi setiap aksi penyampaian pendapat:

Dan saya telah menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat dan rekanrekan (mahasiswa) akan tersalurkan (dengan baik). Tentu kita bisa pastikan pada seluruh proses (aksi demonstrasi ini) berjalan dengan secara aman, dan

tolong (para polisi) kawal adik-adik (mahasiswa) kita ini, anak-anak (mahasiswa) kita ini, teman-teman (masyarakat umum) kita, jaga mereka (yang hadir) dan kawal mereka," ucap Sigit.

Aleg PKS: Akibat Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Angka Kemiskinan Meningkat Drastis

KUTIPAN

Jakarta (04/04) --- Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, memperhatikan kondisi yang terjadi di seluruh Wilayah Indonesia, dimana kenaikan harga pangan dan energi seperti BBM dan LPG, telah menjadi Pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat negara ini, diduga telah menaikkan angka kemiskinan.

"Saya meyakini, bahwa kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah ke bawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini. Pemerintah harus cek, dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut", tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi

Selatan II ini mengatakan, kini masyarakat telah terpukul dengan sejumlah harga pangan masih bertahan di harga tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabai rawit merah.

"Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 Persen dan kenaikan harga Pertamina, serta Solar non subsidi pun terjadi. Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen", ujar Akmal.

Akmal mengatakan,

persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga 14 ribu rupiah hanya isapan jempol belaka. Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp 19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga 50 ribu rupiah per 2 Liter.

"Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain ada janji minyak goreng dengan harga ditetapkan pemerintah, tapi barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong", ketus Akmal.

Politisi PKS ini menyarankan kepada pemerintah, bahwa semua komoditas strategis seperti pangan dan energi, mesti pemerintah yang menjadi price leader.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

"Kondisi saat ini, dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Tapi pemerintah mesti sadar, bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar, sehingga perlu keterampilan tingkat tinggi di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara kita akibat kemiskinan"

Peringati Hari Nelayan, Aleg PKS: Nelayan Juga Rakyat Indonesia, Jangan Pinggirkan!

KUTIPAN

Jakarta (06/04) --- Memperingati Hari Nelayan Indonesia yang jatuh pada tanggal 6 April 2022, Anggota DPR RI sekaligus Ketua umum Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) Slamet meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada nelayan.

Slamet mengaku sangat prihatin terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat akhir-akhir ini mulai dari kelangkaan minyak goreng, solar, kenaikan dan kelangkaan BBM subsidi jenis pertalite, kenaikan harga gas non subsidi dan terakhir kenaikan pungutan pajak PPN.

Adanya kenaikan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi masyarakat secara umum tidak terkecuali nelayan.

"Sejak beberapa tahun lalu kami sudah meminta adanya kebijakan anggaran yang afirmatif. Khususnya bantuan langsung bagi entitas petani dan nelayan. Tujuannya agar

dalam kondisi seperti sekarang ini nelayan tidak mengalami penurunan daya beli," ungkap drh. Slamet di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Slamet juga mendorong agar kebijakan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Otomatis melalui adjusment jika memungkinkan dan sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku untuk dapat diberikan porsi bantuan langsung ke nelayan."

Menurutnya kebijakan tersebut dapat menjaga daya beli nelayan pada masa-masa dimana barang-barang kebutuhan pokok mengalami

peningkatan yang signifikan seperti sekarang ini.

"Menjaga daya beli masyarakat nelayan menjadi sesuatu yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah sebab 70 persen kebutuhan produk perikanan Indonesia disuplai oleh nelayan kecil," imbuhnya.

Ia memberikan contoh pada saat ini BBM untuk nelayan mengalami kelangkaan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

"Kondisi ini akan sangat mengganggu aktivitas penangkapan ikan. Jika BBM langka, nelayan kecil akan sulit melaut. Di sisi yang lain kapal-kapal ikan besar juga akan mengurangi jumlah trip penangkapan akibat keterbatasan BBM sehingga pasti ada pengurangan ABK dan tenaga kerja di kapal mengingat sebagian besar ABK dan Tenaga kerja kapal perikanan dipekerjakan dengan sistem kontrak.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

"Kontribusi nelayan terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Sebagai bagian dari sebelas sektor ekonomi kelautan, kesejahteraan para nelayan, apalagi yang di daerah pesisir masih jauh dari harapan. Pemerintah jangan melupakan dan meminggirkan nelayan. Sekali lagi, jangan pinggirkan nelayan"

Harga Kebutuhan Pokok Melonjak dan Gabah Anjlok, Aleg PKS: Tak Adil bagi Petani!

KUTIPAN

Jakarta (08/03) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan merasa bahwa petani di Indonesia telah diperlakukan tidak adil oleh sistem pasar saat ini dan yang lebih memprihatinkan tidak ada kebijakan serius dari pemerintah untuk melindungi harga gabah di tingkat petani supaya lebih stabil.

"Saya sangat prihatin dengan kondisi petani kita saat ini dimana kesejahteraannya terus menurun ditengah lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan semua harga komoditas melonjak namun saat panen harga gabah terus turun dan kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) terus bertambah sehingga dampaknya sangat merugikan petani," sesal Johan.

"Coba bayangkan pada saat indeks harga pangan global mencapai level tertinggi sepanjang sejarah seperti kondisi saat ini, malah para petani kita di tanah air

mengalami situasi sebaliknya, ini tidak adil bagi petani kita, kita semua harus peduli pada nasib petani terutama pemerintah tidak boleh santai saja dengan kondisi petani yang sangat memprihatinkan saat ini," imbuh Johan dengan tegas.

Politisi PKS ini mengungkapkan berdasarkan data BPS, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus turun dari Rp 4.773 per kilogram per Desember 2021 menjadi Rp 4.569 per kg pada Maret 2022.

"Begitu juga dengan semakin meningkatnya kasus harga gabah di bawah HPP

sehingga terkesan kebijakan ini tidak punya arti untuk membela petani," ujar Johan.

Johan menilai anjloknya harga gabah di tingkat petani juga disebabkan oleh hasil produksi yang tidak terserap baik oleh pasar dan pemerintah tidak punya kebijakan untuk menyerap hasil panen petani agar harga stabil.

"Saya menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak pada petani, sebab pemerintah lebih khawatir terhadap kenaikan harga beras di tingkat konsumen daripada turunnya harga gabah di tingkat petani, ini yang harus dikoreksi agar pemerintah punya keberpihakan terhadap para petani," ujar Johan.

Legislator Senayan ini mengkritik pola kebijakan melalui penerapan HPP yang dinilainya sering tidak efektif, begitu juga dengan operasi pembelian gabah dimana pembelianya hanya disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak berdampak pada stabilitas harga gabah, apalagi dipengaruhi oleh sifat harga gabah yang musiman atau



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak pada petani, sebab pemerintah lebih khawatir terhadap kenaikan harga beras di tingkat konsumen daripada turunnya harga gabah di tingkat petani, ini yang harus dikoreksi agar pemerintah punya keberpihakan terhadap para petani

jangka pendek.

Johan mendorong agar instrument kebijakan harga gabah lebih berpihak pada kepentingan petani dan harus ada paket kebijakan yang

lengkap untuk meredakan turunnya harga gabah supaya harganya lebih stabil terutama Ketika masa panen.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Segenap Keluarga Besar
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI
Mengucapkan :

Selamat Hari Raya
Idul Fitri

1 Syawal 1443 H

Taqabbalallaahu minna waminkum

**Putihkan HATI, Segarkan DIRI
dengan saling memaafkan
di hari nan FITRI**



Dr. Salim

Ketua Majelis Syuro PKS



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

LBP Ditunjuk Jadi Ketua Dewan SDA

Aleg PKS: Berpotensi Kontraproduktif dan Tak Fokus Selesaikan Masalah

KUTIPAN

Jakarta (12/04) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, mengkritik penunjukan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional oleh Presiden Jokowi.

Menurut Suryadi, rangkap jabatan yang dilakukan Luhut di banyak instansi dan lembaga, justru berpotensi kontraproduktif.

"Presiden telah mengangkat Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional yang baru sesuai Perpres No.53 Tahun 2022. Banyaknya tugas dan jabatan yang telah diemban oleh Luhut menuai sorotan dari berbagai kalangan, padahal masalah Sumber Daya Air merupakan masalah yang serius dan tidak bisa ditangani secara setengah-setengah", ungkap Suryadi.

Ia meminta Presiden lebih bijak dalam menyelesaikan masalah-masalah Sumber Daya

Air dengan lebih strategis, bukan sekedar mengganti Ketuanya saja, yang notabene sudah memiliki banyak tugas dan peran lain.

"Saat ini Luhut berada di tengah pusaran kontroversi perpanjangan masa jabatan Presiden, tentunya hal ini akan berpotensi akan adanya ketidakfokusan mengurus urusan Sumber Daya Air. Belum lagi berbagai jabatan yang baru saja diembannya, seperti Koordinator PPKM Wilayah Jawa dan Bali dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung", ujarnya.

Ia menjelaskan, pemberian amanat itu sendiri sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari adanya perubahan pembagian tugas

menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019, dimana Kementerian PUPR yang mengurus bidang Sumber Daya Air, saat ini berada di bawah koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut. Namun demikian, seharusnya perubahan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini dilakukan segera setelah adanya perubahan koordinasi tersebut.

"Penggantian Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentunya akan membutuhkan konsolidasi lebih lanjut pada organisasi Dewan Sumber Daya Air Nasional, padahal saat ini sudah di tahun 2022 yang sebentar lagi akan menghadapi tahun 2024 dimana akan terjadi lagi perubahan struktur Pemerintahan", imbuh Anggota DPR dari Dapil Lombok tersebut.

Lebih lanjut, imbuh Suryadi, Fraksi PKS menyoroti berbagai aspek yang berkaitan dengan Sumber Daya Air yang notabene membutuhkan penangan serius oleh Ketua baru.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.

Anggota Komisi V DPR RI

"Diantaranya aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sebagai contoh pada tahun 2020, pada aspek pendayagunaan sumber daya air di KemenPUPR sendiri belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Misalnya menurut Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2020 terkait jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun menurut target 2020 4,1m3/detik hanya bisa direalisasikan sebesar 2,52m3/detik",



Biaya Transportasi Melonjak, Aleg PKS: **Batalkan** Kenaikan Tarif Tol Cipali

KUTIPAN

Jakarta (03/04) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mendesak agar kenaikan tarif tol yang terjadi relatif bersamaan waktunya dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dibatalkan.

Sebagai contoh, kata Sigit, adalah kenaikan tarif Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) per 30 Maret 2022.

Sigit berالasan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak pantas menaikkan tarif tol karena Biaya Operasi Kendaraan (BOK) yang harus dikeluarkan oleh masyarakat melonjak. Apalagi ternyata ada kenaikan harga BBM Pertama dan berbagai komoditas lain.

"Hitung saja biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengguna mobil dengan konsumsi BBM Pertama misalnya. Sebelumnya dari Cikampek ke Palimanan yang jaraknya 116 km, besarnya BOK khusus untuk item BBM yaitu Rp 90.000 dan tol Rp 107.500, total Rp 197.500. Saat ini BOK khusus item BBM menjadi Rp

125.000 dan tol Rp 119.000, total Rp 244.000," jelas Sigit dalam keterangannya, diikuti Minggu (03/04).

Sebagaimana diketahui, PT Lintas Marga Sedaya atau Astra Tol Cipali telah menaikkan tarif Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) per 30 Maret 2022 pukul 00:00 WIB.

Penyesuaian tarif ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 263/KPTS/M Tahun 2022.

Adapun kenaikan tarif Tol Cipali tersebut berlaku untuk ruas tol terajuh untuk asal dan tujuan perjalanan ruas Tol Cipali pada sistem transaksi tertutup.

Tarif Tol Cipali untuk kendaraan Golongan I naik dari Rp 107.500 menjadi Rp 119.000, tarif untuk kendaraan Golongan

II naik dari Rp 177.000 jadi Rp 196.000, tarif untuk Golongan III naik dari Rp 177.000 menjadi Rp 196.000, tarif untuk Golongan IV naik dari Rp 222.000 jadi Rp 246.000, dan tarif untuk Golongan V naik dari Rp 222.000 jadi Rp 246.000.

Operator jalan tol selalu berdalih bahwa kenaikan tarif ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 dimana evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) disesuaikan dengan inflasi.

Namun menurut Legislator PKS ini, semestinya aturan tersebut bukan berarti selalu harus ada kenaikan tarif tol secara periodik dua tahunan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain.

"Faktor lain yang dimaksud adalah kondisi yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan tol. Jadi seandainya standar pelayanan minimal (SPM) dipenuhi misalnya, itu jangan menjadi satu-satunya pertimbangan," tandas Sigit.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

"Selain SPM jalan tol yang harus dipenuhi, operator jalan tol semestinya juga mempertimbangkan daya beli masyarakat yang semakin rendah karena bersamaan waktunya terjadi kenaikan item BOK yaitu biaya BBM. Terkait SPM ada pertanyaan apakah ada audit keselamatan jalan tol Cipali, dan hasil audit sudah dipublikasikan? Sepertinya aturan terkait kenaikan tarif dalam Undang-undang harus direvisi agar lebih berkeadilan"

Aleg PKS Minta PUPR Awasi Persiapan Jalan Tol Jelang Mudik Lebaran 2022

KUTIPAN

Tasikmalaya (12/04) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat akan mengawasi kesiapan pemerintah menjelang Mudik Lebaran Tahun 2022. Setelah 2 tahun pemerintah melarang kegiatan pulang kampung pada hari raya umat muslim. Akibat kondisi pandemi. Toriq tidak ingin pemerintah gugup dalam melaksanakan kegiatan ini.

"Berkaca pada evaluasi pelaksanaan mudik tahun 2017, 2018 dan 2019. Pemerintah mampu memperbaiki kinerjanya paska tragedi brexit tahun 2016. Untuk tahun 2022, pemerintah harus mempertahankan capaian tersebut bahkan meningkatkan pelayanannya. Agar kegiatan mudik di masa pandemi ini berjalan lancar," tutur Politisi PKS ini.

Sebagai mitra kerja pemerintah yang berfokus pada infrastruktur dan transportasi, Toriq meyakini sebagian besar

pemudik yang menggunakan kendaraan roda empat akan menggunakan jalan tol. Saat ini panjang jalan tol yang operasional di Indonesia adalah 2.500 km.

"Keberadaan 66 ruas jalan tol yang tersebar di Pulau Sumatra sepanjang 691 km, Pulau Jawa sepanjang 1.640,4 km, Pulau Bali sepanjang 10,1 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,3 km, dan Pulau Sulawesi sepanjang 61,5 km akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Karenanya saya meminta semua Badan Usaha

Jalan Tol (BUJT) mempersiapkan diri sejak sekarang," ujarnya.

Menurut Toriq, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus memastikan BUJT melakukan pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelebaran jalan untuk mempertahankan jalan dalam kondisi mantap. Tidak kalah penting, peningkatan berbagai fasilitas di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP).

"Mengingat akan ada sekitar 3,8 juta pemudik yang akan melalui jalan tol.

Kementerian PUPR harus memastikan BUJT menjamin jalan tol diseluruh ruas dalam kondisi baik. Tidak ada yang rusak dan berlubang. Sarana prasarana istirahat, ibadah dan kebersihan harus ditambah, sekaligus ramah difabel. Naiknya tarif tol saat ini harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan," tutupnya.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus memastikan BUJT melakukan pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelebaran jalan untuk mempertahankan jalan dalam kondisi mantap. Tidak kalah penting, peningkatan berbagai fasilitas di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)."

Terkait BLT Minyak Goreng, Aleg PKS Minta Pemerintah Selesaikan Akar Masalahnya

KUTIPAN

Jakarta (07/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, menanggapi pemerintah yang mengumumkan akan memberikan BLT minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga, meminta agar persoalan minyak goreng juga perlu ada solusi mengurai akar masalah yang membuat kondisi tata nia-ga minyak goreng seperti 6 bulan terakhir.

"Selain pada kebijakan BLT minyak goreng ini, ada hal esensial yang mesti diselesaikan yakni kekuatan pemerintah untuk menjadi price leader dalam semua lini komoditas strategis termasuk minyak goreng. Saat ini, Swasta lebih superior dibanding pemerintah terkait kebijakan harga minyak goreng menjadi pelajaran penting kedepan jangan sampai ini terjadi lagi", tutur Nevi.

Politisi PKS ini mendapati data bahwa dengan digelontorkannya BLT minyak goreng kepada masyarakat yang

masuk dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) dan 2,5 juta pelaku UMKM gorengan, mesti dapat menjadi solusi jangka pendek.

"Karena BLT tersebut nilainya cukup besar yakni lebih kurang sebesar Rp6,9 triliun, meskipun bila diurai hanya senilai Rp300.000 per keluarga," ujarnya.

Nevi menerangkan, Berdasarkan informasi yang ia peroleh, dana BLT Minyak Goreng ini diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19. Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin. Dengan adanya BLT minyak goreng, maka sebagian dana tersebut, tersedot untuk BLT minyak goreng.

"Sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, Harusnya pemerintah tegas menjalankan UU dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng di tanah air. Sehingga negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng. Ini yang saya harapkan menjadi solusi jangka panjang di kemudian hari.

Sedangkan untuk jangka menengah, saya setuju dengan KPPU yang merekomendasikan pemerintah untuk segera menyediakan insentif untuk mendorong hadirnya produsen baru minyak goreng skala kecil dan menengah (UKM) yang mendekati lokasi perkebunan sawit. Hal itu terutama dilakukan di wilayah yang tidak terdapat produsen minyak goreng. Sehingga pasokan minyak goreng di daerah tersebut tetap terjaga", tegas Nevi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

"Saya mengingatkan, agar pelaksanaan BLT minyak goreng mesti tepat sasaran. Ini penting menjadi perhatian karena pengalaman masa lalu yakni pada Agustus 2021 Mensos Risma pernah menyatakan bahwa masalah utama di Kemensos ialah perihal data ganda bantuan sosial (bansos) dan skema program bantuan yang berbelit. Semua persiapan harus matang karena jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari"



Kunjungi Pasar Tradisional, Aleg PKS: Harga Minyak Goreng Curah Masih diatas HET

KUTIPAN

Bogor (13/04) --- Panitia Kerja (Panja) Pangan Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan ke Pasar Surya Kencana Kota Bogor, Senin (12/4/2022).

Kunjungan tersebut untuk memantau stok dan harga kebutuhan pokok selama Ramadhan tahun ini.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Panja Komisi VI DPR RI, Amin Ak menemukan, harga jual minyak goreng curah masih diatas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 15.500 per kg atau Rp 14.000 per liter.

Di pasar Surya Kencana Bogor, minyak goreng curah dibanderol seharga Rp 20 ribu per kg atau Rp 18 ribu per liter.

Selain itu, stok minyak goreng curah juga belum stabil karena masih ada pembatasan dari distributor. Akibatnya, pedagang pun membatasi penjualan ke konsumen.

"Minyak goreng curah itu kan untuk menyasar konsumen kelas menengah bawah dan

pelaku usaha mikro. Sedikit kenaikan harga saja akan mempengaruhi daya beli. Saya minta pemerintah membenahi tata niaga agar harga sesuai HET," ujar Amin.

Amin meminta Pemerintah mengawasi distribusi minyak goreng curah. Ada dugaan terjadi penyelewengan penjualan dengan cara mengemas ulang minyak goreng curah menjadi minyak kemasan dan dijual dengan harga lebih tinggi. Aksi spekulasi tersebut menyebabkan keterbatasan stok dan tingginya harga minyak goreng curah di berbagai pasar tradisional.

"Jika Tata Niaga minyak goreng curah tidak tertibkan, maka BLT minyak goreng pun hanya menguntungkan para pemburu rente. Rakyat kecil

tidak menikmatinya," ujar Amin.

Selain minyak goreng, sejumlah kebutuhan pokok juga masih tinggi harganya. Sebagai contoh harga ayam mencapai Rp 40 ribu per kg, harga daging sapi Rp 150 ribu per kg, demikian juga beras mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kg.

"Ramadhan sudah memasuki pertengahan, lebaran sebentar lagi tiba. Ini kok harga-harga kebutuhan pokok masih tidak terkendali. Kinerja pemerintah masih mengecewakan," kata Amin.

Jika pemerintah kembali gagal mengendalikan harga kebutuhan pokok, maka inflasi akan semakin tinggi. Disisi lain, alokasi anggaran untuk subsidi pun akan membengkak.

"Pemerintah harus membatalkan kenaikan PPN harga kebutuhan pokok dan produk pertanian. Inflasi harus direm, agar ekonomi rakyat tidak semakin berat," pungkasnya.



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Minyak goreng curah itu kan untuk menyasar konsumen kelas menengah bawah dan pelaku usaha mikro. Sedikit kenaikan harga saja akan mempengaruhi daya beli. Saya minta pemerintah membenahi tata niaga agar harga sesuai HET,"



Legislator PKS: BLT Minyak Goreng Ujung-ujungnya untuk Pengusahanya Juga

KUTIPAN

Jakarta (13/04) --- Meski program bantuan langsung tunai (BLT) dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat tapi pemerintah jangan lalai menuntaskan akar masalah sebenarnya.

Akar masalah saat ini adalah tata kelola minyak goreng sawit (MGS) yang oligopolistik sehingga pasokan dan harganya dikuasai oleh segelintir pengusaha.

Demikian dikatakan Mulyanto menanggapi program BLT yang diluncurkan pemerintah baru-baru ini.

Mulyanto menyebut program ini pasti disambut baik dan dinanti masyarakat kecil. Apalagi, selain minyak goreng, harga-harga bahan kebutuhan pokok yang lain seperti gula, kedelai, daging, dll juga sudah merambat naik.

Namun pemerintah tidak boleh mengandalkan program jangka pendek semacam ini. Pemerintah tetap harus fokus menyelesaikan akar masalah sebenarnya agar kelangkaan dan kemahalan MGS tidak

terjadi lagi di kemudian hari.

"Program BLT ini dapat dibaca sebagai teguran kepada Menperin, yang sampai hari ini, hampir satu bulan, belum mampu menurunkan harga minyak goreng sawit (MGS) curah seharga HET sebesar Rp. 14 ribu per liter atau Rp. 15.500 per kg. Data hari ini menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS nasional) harga rata-rata MGS curah masih bertengger di angka Rp. 19.950 per kg. Kalau harga MGS curah sudah mencapai HET, tentu Pemerintah tidak harus bersusah-payah mengururkan program BLT minyak goreng ini," kata Mulyanto kepada media, Selasa (12/04/2022)

Dalam sudut pandang lain, lanjut Mulyanto, selama harga MGS curah ini masih di atas

HET, sebenarnya BLT tersebut lebih dinikmati oleh pengusaha MGS ketimbang rakyat kecil. Karena dalam praktiknya, selisih antara harga jual dengan HET MGS tersebut langsung ditutup oleh dana BLT tersebut. Uang yang diterima rakyat kecil dari BLT ini sebenarnya cuma 'numpang lewat' saja. Untuk selanjutnya uang tersebut masuk ke kantong pengusaha MGS.

"Jadi sebenarnya pengusaha MGS ini mendapat double subsidi. Satu subsidi di hulu, melalui dana BDPKPS (badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit) dan satu lagi subsidi di hilir, melalui dana BLT," terang politisi PKS yang akrab dipanggil Pak Mul ini.

Karenanya Mulyanto mendesak, agar Menperin serius menyelesaikan tata niaga MGS curah ini agar harganya segera mencapai HET.

"Jangan mengandalkan pendekatan BLT yang bersifat jangka pendek dan tidak seberapa. Pemerintah secara struktural harus mampu mengendalikan harga MGS curah ini. Jangan kalah dan dipermainkan oleh pengusaha nakal," tegas Mulyanto.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Jangan mengandalkan pendekatan BLT yang bersifat jangka pendek dan tidak seberapa. Pemerintah secara struktural harus mampu mengendalikan harga MGS curah ini. Jangan kalah dan dipermainkan oleh pengusaha nakal,"

Untuk diketahui, Pemerintah berencana menyalurkan BLT (bantuan langsung tunai) sebesar Rp. 300 ribu per orang kepada 20,5 juta keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang berjumlah

makanan gorengan. Rencananya sebelum lebaran Idul Fitri, BLT ini sudah tersalurkan kepada masyarakat yang berhak secara tepat sasaran. Masyarakat diminta untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran BLT ini, agar tidak disimpangkan untuk tujuan-tujuan yang tidak diharapkan.

Soal Kenaikan Harga Migas,

Aleg PKS: Tak Bisa Segalanya Dilepas ke Mekanisme Pasar!

KUTIPAN

Jakarta (08/04) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI, Diah Nurwitasari, menyampaikan pandangannya terkait kenaikan harga komoditas energi dalam program PKS Legislative Corner (PLC) yang membahas tentang 'Tata Niaga Energi Buruk, Dari BBM Hingga LPG 3 Kg Naik,' secara virtual, Jumat, (08/04).

Diah mengawali dengan menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM dan LPG 3 Kg ini merupakan imbas dari kondisi harga migas dunia yang memang beberapa waktu terakhir sedang naik. Terlebih lagi situasi perang Rusia-Ukraina, yang semakin menyebabkan supply menipis, sementara permintaan banyak.

"Kebutuhan BBM di Indonesia sekarang sekitar 1,5 juta barel/hari. Sementara kapasitas produksi negara masih dikisar angka 600-700 ribu barel/hari. Jadi ini ada gap antara kemampuan produksi kilang dalam negeri dan

kebutuhan nasional. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan itu, impor BBM," paparnya secara virtual.

Hal yang tak jauh berbeda, imbuh Diah, terjadi pada LPG. Ia memaparkan bahwa sekarang ini bisa dikatakan 80% kebutuhan LPG adalah impor. Karena kebutuhan nasional sudah impor, lalu adanya kenaikan harga gas dunia, secara otomatis harga LPG di tanah air pun turut naik.

"Harga energi bisa naik, karena kita banyak bergantung pada impor. Kenaikan dan dinamika harga internasional pasti berpengaruh pada biaya

yang harus kita keluarkan untuk menyediakan BBM atau LPG di tengah masyarakat," ujar Diah.

Meski demikian, ia mengkritik Pemerintah yang cenderung terus melepas harga migas untuk mengikuti mekanisme pasar semata. Menurutnya, ini sesuatu yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945.

"Konstitusi kita itu tegas mengamankan kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi. Pada Pasal 33 UUD NRI 1945 ayat 1, 2, dan 3 mengamankan itu. Jadi kita punya amanat konstitusi tidak bisa main melepaskannya saja ke mekanisme pasar. Kalau jadi apa gunanya Pemerintah? Pemerintah itu kan sebagai regulator, pemerintahlah yang menjamin kesejahteraan buat masyarakat, harus ada pengaturan dari Pemerintah yang jadi tujuan adalah kesejahteraan bersama," tegasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dipl.Ing. Hj. **DIAH NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Komisi VII DPR RI

“Saya berharap pemerintah harus sangat berhati-hati, tidak tergesa-gesa, terlebih lagi di bulan suci Ramadhan, dalam menghadapi lebaran, jangan kasih kejutan yang pahit buat masyarakat. Jangan semakin menyakitkan masyarakat dengan kenaikan ini. Masih ada sejumlah solusi untuk mencegah harga kenaikan ini,”

Youtube Channel

PKSTV
DPR RI



*Thank
You*

Saudi Buka Jutaan Jemaah Haji, HNW: Pemerintah Perjuangkan Kuota Terbaik Calhaj Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (11/04) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mendorong Pemerintah untuk memperjuangkan kuota terbaik bagi calon jemaah haji Indonesia, menyusul keputusan pemerintah Saudi Arabia yang membuka kuota haji 1443 H untuk 1 juta jemaah.

HNW sapaan akrabnya meminta Kementerian Agama hendaknya jangan hanya pasif menerima berapapun alokasi kuota untuk Indonesia nantinya, tapi perlu terus memperjuangkan melalui jalur diplomasi tingkat tinggi, agar Indonesia mendapat kuota terbaik, kalau perlu dan untuk membuktikan keseriusan Pemerintah, agar Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Saudi untuk mendapatkan kuota terbaik tersebut.

"Saya mengapresiasi sudah ada kepastian dari Saudi untuk dibukanya kuota Haji 1443 H bagi 1 juta jemaah

termasuk dari luar Saudi. Untuk itu Pemerintah Indonesia perlu segera memastikan lebih detail soal syarat-syaratnya, serta memperjuangkan kuota terbaik untuk calhaj dari Indonesia, mengingat daftar tunggu yang sangat panjang dan ditambah dengan sudah 2 tahun tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/4).

HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR RI yang mengurus masalah keagamaan ini mencatat, di tahun 2019 dimana jumlah jemaah haji berkisar 2,5 juta orang,

Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 218.150 orang. Artinya dengan jumlah jemaah di tahun 2022 sebanyak 1 juta jemaah, minimal Indonesia bisa memperoleh alokasi bagi 87.631 orang.

"Tapi kami mendorong agar kuota Indonesia bisa diperjuangkan agar jumlahnya bisa di atas 100 ribu orang dengan upaya diplomasi tingkat tinggi, sekaligus melobi untuk bisa menggunakan jatah kuota yang tidak terpakai dari negara lain. Hal ini selain untuk mengobati keinginan warga Muslim Indonesia untuk melaksanakan rukun Islam yang ke lima (haji), juga agar antrean jemaah calon haji dari Indonesia ke depannya tidak semakin panjang, dan tak teratasi," sambungnya.

HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS mendesak Kemeng untuk segera mempersiapkan secara maksimal persiapan teknis keberangkatan haji, baik melalui persiapan internal, koordinasi dengan Komisi VIII DPR-RI, hingga komunikasi dan sosialisasi dengan ormas Islam



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

"kami mendorong agar kuota Indonesia bisa diperjuangkan agar jumlahnya bisa di atas 100 ribu orang dengan upaya diplomasi tingkat tinggi, sekaligus melobi untuk bisa menggunakan jatah kuota yang tidak terpakai dari negara lain"

dan asosiasi-asosiasi penyelenggara haji dan umrah.

Pasalnya sesuai kalender Hijriyah, pemberangkatan jamaah haji 1443 H kloter diperkirakan akan diberangkatkan pada tanggal 4 Dzulqal'dah H atau bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2022.

"Artinya waktu yang tersisa kurang dari dua bulan lagi.

Kemeng khususnya Ditjen PHU harus mengعبut persiapan dan memastikan semuanya dalam keadaan siap, jangan sampai justru terjadi insiden yang merugikan Jemaah dan mencoreng nama Indonesia dalam pelaksanaan haji 1443 H nanti," lanjutnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Aleg PKS Imbau Pemerintah Jaga Hubungan Baik dengan PP Muhammadiyah

KUTIPAN

Jakarta (07/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengimbau Pemerintah menjaga hubungan baik dengan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah.

Imbauan ini disampaikan menyusul insiden tidak diundangnya PP Muhammadiyah dalam sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1443 H oleh Kementerian Agama.

“Pemerintah sepatutnya memperbaiki hubungan dengan seluruh elemen anak bangsa, terutama dengan PP Muhammadiyah terkait dengan insiden tidak diundangnya pihak terkait saat penetapan awal Ramadhan. Kami percaya Kemendagri mengetahui secara persis cara menjaga hubungan baik dan melakukan islah dengan PP Muhammadiyah,” ucap Bukhori di Jakarta, Rabu (06/04/2022).

Legislator Dapil Jawa Tengah 1 ini juga menyangkan kesalahan prosedur komunikasi yang menyebabkan tidak tersampainya itikad

baik Kementerian Agama melibatkan perwakilan resmi PP Muhammadiyah dalam sidang isbat penetapan awal Ramadhan.

Bukhori menambahkan, selain memunculkan prasangka di tengah umat Islam, tidak diundangnya PP Muhammadiyah oleh Kementerian Agama juga menyalaht fatwa MUI terkait penetapan awal Ramadhan.

Merujuk pada Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah disebutkan dalam butir ketiga bahwa dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan MUI, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait.

“Perlu ada evaluasi terkait dengan tata kelola hubungan

antar lembaga/organisasi. Kementerian Agama sebagai representasi dari negara perlu menempatkan dirinya sebagai orang tua bijaksana yang mengayom, merangkul, dan melindungi seluruh elemen umat Islam di Indonesia. Segala bentuk kesalahpahaman mesti segera diselesaikan melalui klarifikasi dan silaturahmi supaya polemik tidak berlangsung berlarut-lurut dan umat senantiasa diselimuti rasa sejuk dalam menjalani kehidupan beragama dan bernegara,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mut'i, memberikan klarifikasi terkait tidak diundangnya PP Muhammadiyah dalam sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1443 H oleh Kementerian Agama. Dia mengaku pihaknya belum menerima surat undangan dari Kementerian Agama untuk menghadiri sidang isbat.

Ia menegaskan, pihak yang diklaim oleh Kementerian Agama sebagai perwakilan Muhammadiyah bukanlah utusan resmi Muhammadiyah lantaran tidak membawa mandat resmi dari organisasi.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Perlu ada evaluasi terkait dengan tata kelola hubungan antar lembaga/ organisasi. Kementerian Agama sebagai representasi dari negara perlu menempatkan dirinya sebagai orang tua bijaksana yang mengayom, merangkul, dan melindungi seluruh elemen umat Islam di Indonesia. Segala bentuk kesalahpahaman mesti segera diselesaikan melalui klarifikasi dan silaturahmi supaya polemik tidak berlangsung berlarut-lurut dan umat senantiasa diselimuti rasa sejuk dalam menjalani kehidupan beragama dan bernegara,

Aleg PKS Minta Kementerian Sosial Lebih Perhatikan Penyandang Disabilitas

KUTIPAN

Jakarta (08/04) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis meminta Kementerian Sosial Republik Indonesia agar memastikan penyaluran alat bantu penyandang disabilitas agar disalurkan pada tahun ini.

"Penyaluran alat bantu untuk penyandang disabilitas ini saya harapkan bisa terealisasi secara merata dengan jumlah diatas 10.000, diharapkan nantinya alat bantu ini bisa sangat bermanfaat bagi saudara kita penyandang disabilitas tersebut. Saya harapkan juga untuk pengalokasian anggaran terutama dari Sekjen Kementerian Sosial ini yang mengaturnya akan digunakan sesuai dengan ketersediaan alat bantu yang bisa dipergunakan sendiri oleh penyandang disabilitas itu seperti motor roda tiga dan lainnya", ujar Iskan.

Politisi asal Sibuhuan ini juga menambahkan bahwa

Kementerian Sosial harus mengawasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran pendistribusiannya kepada penyandang disabilitas itu.

"Untuk penyaluran alat bantu kepada penyandang disabilitas ini agar Kementerian Sosial dapat mengawasi secara ekstra dan bisa juga berkoordinasi dengan instansi yang bermitra guna untuk menjaga keamanan dari pendistribusiannya bantuan itu. Seperti pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tentang Negara Wajib Melindungi dan Menjamin Hidup Kepada Seluruh Warga Negeranya. Semoga tahun ini dapat direalisasikan dengan cepat dan aman untuk bantuan

penyandang disabilitasnya agar bisa tepat sasaran juga penyalurannya", tegas Iskan.

Lebih lanjut Iskan juga menambahkan bahwa penyaluran bantuan bagi penyandang disabilitas dari Kementerian Sosial ini semoga dapat dipergunakan secara baik dari penerima bantuan tersebut.

"Saya harapkan bantuan bagi penyandang disabilitas ini dapat dipergunakan dengan baik dan bermanfaat bagi penerima bantuan penyandang disabilitas itu, semoga bisa membantu untuk mencari nafkah rezeki dari penyandang disabilitas tersebut. Semoga prosesnya dari kementerian sosial dapat berjalan lancar sehingga program bantuan untuk disabilitas ini dapat berjumlah 10.000 lebih alat bantu tahun ini yang akan disalurkan kepada penyandang disabilitas di Tanah Air", pungkas Iskan mengakhiri.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

"Penyaluran alat bantu untuk penyandang disabilitas ini saya harapkan bisa terealisasi secara merata dengan jumlah diatas 10.000, diharapkan nantinya alat bantu ini bisa sangat bermanfaat bagi saudara kita penyandang disabilitas tersebut"

Dukung Kebijakan Pembayaran THR 100 Persen, Wakil Ketua FPKS: Pandemi Jangan Jadi Alasan Lagi

KUTIPAN

Jakarta (10/04) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan membayar penuh Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini.

"Kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar THR secara penuh ini harus didukung. Saat ini dunia usaha sudah mulai bangkit seiring dengan turunnya kasus Covid-19. Jadi tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk memangkas THR pekerja," kata Netty dalam keterangan media, Minggu (10/04).

Diketahui Kemnaker RI mewajibkan THR tahun ini dibayar penuh oleh perusahaan sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Netty juga pemerintah mengawasi dan memantau secara langsung pemberian THR oleh perusahaan.

"Pemerintah harus menegaskan kepada perusahaan bahwa THR bukan hadiah yang diberikan sukarela, tapi kewajiban yang harus ditunaikan," katanya.

Menurut politisi PKS ini, THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan adalah amanah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

"Suka tidak suka ini harus dijalankan. Pelanggaran

terhadap peraturan ini harus ada konsekuensi hukumnya," ujar Netty.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar mengecek langsung ke lapangan jika ada perusahaan yang berdalih kondisi keuangannya sedang sulit.

"Pastikan tidak ada perusahaan yang berlindung di balik sulitnya kondisi keuangan karena ingin menghindari kewajiban membayar THR," kata Netty.

Netty menilai pembayaran THR secara penuh akan membantu masyarakat yang sedang tertekan seiring naiknya harga bahan-bahan pokok.

"Apalagi saat ini harga-harga kebutuhan pokok masyarakat melonjak tajam. Setelah minyak goreng, pertamax dan bahkan pertalite serta gas 3 kg rencananya juga akan naik" Katanya.

Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini juga meminta pemerintah agar aktif mencari informasi terkait keluhan pekerja, bukan hanya menunggu laporan.

"Jangan hanya menunggu



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

"Jangan hanya menunggu laporan, karena umumnya pekerja enggan dan takut melaporkan perusahaannya yang tidak membayar THR. Mereka takut dipecat, apalagi yang statusnya pekerja kontrak. Pemerintah harus sigap mencari informasi perusahaan-perusahaan yang belum mencairkan THR, mengingatkan dan jika perlu berikan sanksi yang tegas"

laporan, karena umumnya pekerja enggan dan takut melaporkan perusahaannya yang tidak membayar THR. Mereka takut dipecat, apalagi yang statusnya pekerja kontrak.

Pemerintah harus sigap mencari informasi perusahaan-perusahaan yang belum mencairkan THR, mengingatkan dan jika perlu berikan sanksi yang tegas," ungkap Netty.



Legislator PKS Dorong Perpusnas **Prioritaskan** Daerah 3T Tingkatkan Literasi Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (08/04) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, mendorong Pemerintah memperhatikan daerah 3T mendapatkan perhatian prioritas.

Hal ini disampaikan Sakinah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perustakaan Nasional Republik Indonesia di ruang sidang Komisi X DPR RI, Kamis, (7/4/2022).

Politikus perempuan Partai Keadilan Sejahtera Dapil Sulawesi Tengah ini menyampaikan bahwa di daerah 3T memang sangat kekurangan buku, terlebih daerah kepulauan yang terpencil.

"Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah karena sumber data alam yang luar biasa tapi sayang kalau tidak dibarengi dengan sumber daya manusianya," ungkapnya.

Lebih lanjut Sakinah mengatakan bahwa masyarakat di daerah 3T sangat butuh sentuhan dan perhatian khusus

karena kondisi wilayah yang sangat jauh dari kota.

"Saya menginginkan daerah-daerah 3T ini menjadi prioritas perhatian Pemerintah, terlebih daerah 3T yang memiliki potensi yang sangat besar. Mereka mempunyai sumber daya alam yang melimpah, kekayaan laut, ikan yang sangat melimpah tapi tidak diberdayakan dengan baik karena mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat," ungkapnya.

Perpustakaan merupakan salah satu modal utama dalam meningkatkan sumber daya manusia.

"Mereka bisa membaca buku-buku perpustakaan, sehingga mereka teinspirasi untuk berkarya, memajukan

dan mampu mengelola sumber daya alam yang ada," pungkasnya.

Sakinah pun menyampaikan belum lama ini berkunjung ke desa terpencil. Jarak tempuh dari Kota Palu dibutuhkan waktu lebih dari 20 jam, harus ditempuh menggunakan speed boat.

"Bahwa di pulau terpencil yang jauh disana ada seorang markonis yang bernama Husny Lashinta Rampales yang mendapat penghargaan 10 peng-gagas dunia. Husny semasa masih hidup pernah aktif di Perpustakaan HB. Yassin, Taman Ismail Marzuki," ucapnya.

Sakinah pun mendukung Perpusnas untuk meningkatkan anggaran pada tahun anggaran ini.

"Mendukung peningkatan Anggaran yang diminta tambahan oleh Perpustakaan Nasional. Ini harus didorong, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga harus memperhatikan daerah-daerah 3T, menjadikannya skala prioritas. Jangan sampai ada ketimpangan seperti sekarang ini," pungkasnya.



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

"Saya menginginkan daerah-daerah 3T ini menjadi prioritas perhatian Pemerintah, terlebih daerah 3T yang memiliki potensi yang sangat besar. Mereka mempunyai sumber daya alam yang melimpah, kekayaan laut, ikan yang sangat melimpah tapi tidak diberdayakan dengan baik karena mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat"

Mahendra Siregar Ketua DK OJK, Aleg PKS Ingatkan Janji Harus Segera Direalisasikan

KUTIPAN

Jakarta (10/04) --- Komisi XI DPR RI telah menetapkan Mahendra Siregar menjadi Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 setelah selama 2 hari melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 14 orang calon DK OJK.

Mahendra yang saat ini masih menduduki kursi Wakil Menteri Luar Negeri akan menggantikan Wimboh Santoso pada periode 2022-2027.

Terkait dengan terpilihnya Mahendra Siregar sebagai ketua DK OJK, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengatakan bahwa para pimpinan DK OJK memiliki banyak tantangan dan pekerjaan besar.

Masalah-masalah di industri keuangan yang sangat kompleks, kata Anis, harus segera diselesaikan terutama untuk sektor non bank. Walaupun sektor perbankan dan pasar modal juga tidak bisa disepelekan.

"Industri asuransi dan berbagai macam polemik dan permasalahannya harus segera diselesaikan. Kepercayaan masyarakat kepada industri perasuransian harus dikembalikan. Termasuk edukasi kepada mereka terkait produk-produk industri keuangan juga harus dimaksimalkan," kata Anis di Jakarta, Sabtu (09/04/2022).

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menitipkan pesan khusus terkait para nasabah yang minim edukasi.

"Jangan sampai mereka menjadi korban karena

'ketidaktahuan' dan minimnya edukasi," ujar Anis.

Berdasarkan pengamatan-anis di lapangan, Anis menegaskan bahwa faktanya banyak korban produk industri keuangan dikarenakan minimnya edukasi mulai dari pinjol sampai asuransi.

Secara khusus, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini berharap Mahendra benar-benar melaksanakan apa yang sudah ia paparkan saat fit and proper test kemarin.

"Enam prioritas janji apabila terpilih memimpin pimpinan DK OJK harus segera direalisasikan," tegas Anis.

Independensi OJK harus dibuktikan, termasuk janji 100 hari pertamanya untuk meningkatkan kapabilitas dan sumber daya fungsi pengawasan inti dengan membenahan internal dan check and balance.

"Dan kita juga menunggu bukti atas janji beliau untuk membuat roadmap, prioritas OJK dan peta jalan industri keuangan non bank (IKNB)," tutup Anis.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

"Industri asuransi dan berbagai macam polemik dan permasalahannya harus segera diselesaikan. Kepercayaan masyarakat kepada industri perasuransian harus dikembalikan. Termasuk edukasi kepada mereka terkait produk-produk industri keuangan juga harus dimaksimalkan"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif

Selamat & Sukses Milad Ke-20 PKS



Dr. SALIM

Ketua Majelis Syuro PKS



20 April 2002 - 20 April 2022



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Kado Milad 20 Tahun PKS



OLEH

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

Masa kematangan diri (*Self Maturity*) akan terlihat diusia 20 tahun. *Self Maturity* merupakan kemampuan individu dalam mengaktualisasikan dirinya yang ditandai dengan keinginan jiwa yang selalu berjuang demi mencapai masa depan, berani, tekun, mandiri dan berkomitmen terhadap apa yang menjadi harapan serta tanggung jawabnya.

Usia 20 untuk sebagian orang adalah fase kehidupan baru yang sulit, di mana kita dituntut menyelesaikan hal-hal yang pernah dimulai ketika kanak-kanak hingga remaja, usia di mana satu-persatu teman yang pernah menemani pergi memilih jalannya sendiri, juga usia di mana kita memulai fase kedewasaan dan kematangan diri.

Seperti halnya PKS yang dikenal dengan partainya anak muda 20 tahun lalu, tak terasa kini telah menginjak dewasa. Inshaallah, banyak perubahan bagi bangsa ini yang telah PKS mulai dan telah dilakukan, namun pekerjaan rumah juga tidak kalah banyak untuk segera kita selesaikan.

Era disrupsi serta dinamika iklim demokrasi, menjadi tantangan tersendiri bagi PKS diusianya yang menginjak dewasa. Saat ini tidak ada lagi batasan wilayah, semua sudah terhubung secara

terbuka, peluang dan ancaman saling bersikutan, siapa yang kreatif dia yang menang, siapa yang progresif menghadapi perubahan dia yang bertahan.

Semangat Transformasi sebagai Ruh Rahmatan Lil 'Alamin
PKS diawal berdiri 20 tahun silam sebagai Partai Islam, telah membaca segala kemungkinan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Sesuatu yang pertama kali dibaca sebagai sebuah keniscayaan adalah transformasi. Karena tidak mungkin Islam bisa menghadirkan *Rahmatan Lil 'Alamin* bila umatnya tidak bisa menghadirkan semangat transformasi.

Ketika PKS meyakini pilihannya menjadi partai politik Islam yang membawa misi *'_Rahmatan Lil 'Alamin_'*, maka sejak itu prinsip transformasi sudah seharusnya menjadi identitas dan melekat

Kado Milad 20 Tahun PKS (Tamat)

bersamanya. Untuk itu semangat transformasi harus benar-benar mewarnai setiap perjuangan dan pengembangan partai, kini dan nanti.

Tantangan terbesar transformasi adalah kesiapan PKS untuk bertransisi. Stigma eksklusif eksternal bagi PKS, baik berupa anggapan maupun kenyataan, harus dilakukan transformasi hingga berubah reputasinya menjadi inklusif, inilah esensi dari nilai Rahmatan lil 'Alamiin.

Termasuk diantaranya, tantangan revolusi teknologi 4.0 atau era digital yang secara teknis juga menuntut langkah transformatif PKS untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut. Keseriusan kita menghadapi era digital

adalah dengan melakukan transformasi dan inovasi berbasis digital sehingga masyarakat mudah mengakses PKS kapanpun dimanapun.

Kolaborasi adalah Kunci

Selain transformasi, kolaborasi menjadi keharusan. Dengan konsistensinya perjuangannya, sebagai partai yang memosisikan diri sebagai penyeimbang pemerintah, PKS dituntut harus terus hidup berdampingan bersama masyarakat. Dukungan masyarakat lewat kolaborasi yang tercipta adalah kunci utama mengantarkan PKS pada cita-citanya.

Kolaborasi modal dasarnya adalah keluwesan dan kekokohan diri. Dusiaanya yang mulai beranjak dewasa,

semangat kolaborasi menjadi hal penting. Kita tentunya menyadari bahwa visi besar yang hari ini diemban tidak bisa dituntaskan sendiri, harus dengan kerja-kerja kolaborasi seluruh elemen internal serta dengan pihak eksternal yang memiliki visi yang sama dalam membangun Indonesia.

Semangat Kolaborasi, kebersamaan dan perpaduan dalam segala aspek kebaikan harus terus dibangun dengan siapapun. Bukan hanya kolaborasi politis semata, namun kolaborasi yang mampu menghadirkan solusi, mampu memberdayakan, mampu terus menggerakkan kerja-kerja yang nyata demi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang hakiki.

Transformasi dan kolaborasi tidak hanya mengokohkan wajah PKS baru yang terus berubah, bertransformasi menyesuaikan perubahan zaman, namun juga menegaskan bahwa PKS selalu hadir melayani dan siap bergandengan tangan dengan semua pihak demi memberi solusi bagi setiap permasalahan bangsa.

Spirit baru dengan wajah dan warna baru, bernada semangat segar membara serta logo bulat kokoh yang fokus pada simbol adil sejahtera, seolah menggambarkan spirit dan orientasi kerja dan kinerja



yang ditanamkan PKS pada semua kader dan anggotanya.

Bahwa ketika kesungguhan dan fokus pada kerja pelayanan terus dioptimalkan, terutama dengan semangat transformasi dan kolaborasi, maka kehadiran

PKS sebagai alternatif pemimpin Indonesia dimasa yang akan datang bukan lagi sekedar impian, namun Insyaallah akan menjadi kenyataan, menjadi kado milad PKS usiaanya yang beranjak dewasa.

KUTIPAN

Era disrupsi serta dinamika iklim demokrasi, menjadi tantangan tersendiri bagi PKS usiaanya yang menginjak dewasa. Saat ini tidak ada lagi batasan wilayah, semua sudah terhubung secara terbuka, peluang dan ancaman saling bersikutan, siapa yang kreatif dia yang menang, siapa yang progresif menghadapi perubahan dia yang bertahan.



RUU TPKS Belum Komprehensif

PKS KONSISTEN MENOLAK DILANJUTKAN

Muatan RUU TPKS:

- Pelecehan Seksual Nonfisik;
- Pelecehan Seksual Fisik;
- Pemaksaan Kontrasepsi;
- Pemaksaan Sterilisasi;
- Pemaksaan Perkawinan;
- Penyiksaan Seksual;
- Eksploitasi Seksual
- Perbudakan Seksual; Dan
- Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
- Dll.

Yang belum dimasukkan:

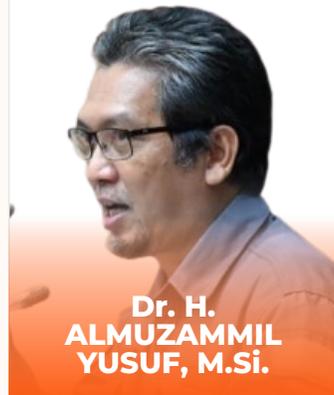
- Perzinaan dan perluasan makna zina
- Penyimpangan seksual (LGBT)

Solusinya SAHKAN segera R KUHP berbarengan dengan RUU TPKS

- Agar Rumusan Tindak Pidananya Lengkap, Integral, Komprehensif, dan Tidak Menimbulkan Pemaknaan Lain yang Tidak Sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Serta norma agama yang hidup di tengah masyarakat.
- Agar RUU TPKS dapat efektif dalam mencegah dan mengatasi seluruh tindak pidana kesusilaan.



“Jika RUU ini berdiri sendiri dan tanpa adanya perluasan makna perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan Larangan LGBT (Pasal 292 KUHP), maka muatan RUU TPKS berisi norma sexual consent, artinya Jika tidak ada kekerasan maka hubungan seksual dibolehkan”.



Dr. H.
ALMUZAMMIL
YUSUF, M.Si.

Berantas Penyalahgunaan Narkoba, Fraksi PKS **Setuju** RUU Perubahan Kedua atas UU No.35 Tahun 2009

KUTIPAN

Jakarta (02/04) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun menaruh perhatian serius terhadap segala upaya yang dilakukan segenap elemen bangsa dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Menurut Adang, perjuangan bangsa Indonesia dalam perang melawan penyalahgunaan narkotika semakin berat dan darurat.

"Angka penyalahgunaan narkotika terus meningkat dimana untuk tahun 2021 saja terjadi peningkatan angka prevalensi pengguna narkotika di Indonesia menjadi 1,95 persen dari total penduduk Indonesia atau sekira 3,66 juta jiwa," papar Anggota DPR asal Dapil DKI Jakarta III ini.

Adang menambahkan, dampak ikutan dari kejahatan narkotika tersebut melahirkan berbagai masalah turunan seperti meluasnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika, tindak pidana pencucian uang,

meningkatnya beban kapasitas (overcrowding) Rutan dan Lapas serta ancaman yang lebih serius: potensi rusaknya generasi masa depan bangsa akibat penyalahgunaan narkotika.

"Sehubungan dengan itu, dengan mencermati berbagai kelemahan dilevel praktik dan produk legislasi yang menyertainya, Fraksi PKS menyambut baik rencana perubahan terhadap UU Narkotika," terangnya.

Secara umum, lanjut Adang, politik hukum penyusunan RUU Narkotika didasarkan pada dua kebijakan dasar yaitu untuk mengatasi masalah over kapasitas rutan dan lapas di Indonesia serta membuat UU Narkotika menjadi lebih luwes dan responsif dalam

mengantisipasi perkembangan zat psikoaktif baru.

"Pada prinsipnya Fraksi PKS mendukung dua kebijakan dasar dimuat dalam RUU Narkotika, Pertama, kebijakan revitalisasi/pengarusutamaan fungsi lembaga rehabilitasi dalam penanganan perkara bagi penyalahguna narkotika. Ketentuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 RUU Narkotika tersebut sematangnya selaras dengan paradigma pemidanaan restorative justice," pungkasnya.

Kedua, tambah Adang, RUU juga memberikan kewenangan kepada BNN dan Kementerian untuk menetapkan jenis dan penggolongan zat psikoaktif baru yang diatur dalam Pasal 52A dan 52B RUU Narkotika.

"Fraksi PKS berpandangan, perubahan terhadap UU Narkotika seharusnya dilakukan secara holistik dan tidak terpaku pada isu rehabilitasi semata. Kelembagaan BNN harus diperkuat, instrumen hukum harus dapat mendorong peningkatan peran aktif masyarakat dan keluarga dalam fungsi pencegahan dan penanggulangan



Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Perjuangan bangsa Indonesia dalam perang melawan penyalahgunaan narkotika semakin berat dan darurat. Angka penyalahgunaan narkotika terus meningkat dimana untuk tahun 2021 saja terjadi peningkatan angka prevalensi pengguna narkotika di Indonesia menjadi 1,95 persen dari total penduduk Indonesia atau sekira 3,66 juta jiwa"

kejahatan narkotika", tegas Mantan Wakil Kepolisian Republik Indonesia ini.

Selain itu, imbuh Adang, kebijakan pemidanaan harus dirumuskan secara tepat dan cermat.

"Sehubungan dengan itu,

dalam rangka menghindari potensi-potensi moral hazard aparat penegak hukum terdapat beberapa substansi dalam RUU Narkotika yang masih perlu disempurnakan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pembentukan Tiga RUU Provinsi Papua, Fraksi PKS: Kami Sepakat!

KUTIPAN

Jakarta (07/04) – Anggota Badan Legislatif DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyampaikan pendapat mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terhadap draft Rancangan Undang-Undang tentang provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah, pada Sidang Balebaleg DPR RI, Kamis (07/04). Dalam uraiannya, Mulyanto menyatakan bahwa Fraksi PKS menyetujui ketiga draft RUU tersebut.

“Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui draft Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah untuk dibahas pada tahap selanjutnya”, tegas Mulyanto.

Lebih lanjut, Mulyanto menyampaikan ada beberapa poin yang menjadi catatan Fraksi PKS terhadap RUU ini, salah satunya berkenaan

dengan otonomi khusus.

“Status otonomi khusus bagi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah sebagaimana tercantum dalam UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diubah dengan UU 35/2008 harus menjadi landasan bagi penetapan status Otsus Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah dalam RUU

ini”, tutur Anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

Selain itu, Anggota DPR yang kerap disapa Pak Mul ini menegaskan bahwa ketiga RUU tersebut harus sesuai dan selaras dengan UU Otsus Papua sekaligus menjadi landasan penetapan Otsus kepada Provinsi ini dan sejalan dengan semangat UU 22/2009 tentang Pemekaran Daerah.

“Fraksi PKS mengusulkan perlu dimasukkannya UU 22/2009 tentang Pemekaran Daerah serta PP 129/2000 sebagai aturan pelaksanaannya. Hal ini merupakan jalan agar RUU ini sesuai dan selaras dengan semangat UU Otsus Papua, sekaligus landasan penetapan Provinsi baru serta sejalan dengan semangat yang dituangkan oleh UU 22/1999 tentang Pemekaran Daerah”, tambahnya.

Sebagai penutup, Mulyanto meminta pemerintah mencermati dan memperhatikan perkembangan isu yang ada di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah.

“Kami meminta pemerintah untuk senantiasa mencermati dan memperhatikan perkembangan isu aktual berkaitan dengan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah yang terjadi di masyarakat dan mengantisipasi persilangan pendapat sehingga meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan”, tutup Mulyanto.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Badan Legislatif DPR RI

“Kami meminta pemerintah untuk senantiasa mencermati dan memperhatikan perkembangan isu aktual berkaitan dengan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah yang terjadi di masyarakat dan mengantisipasi persilangan pendapat sehingga meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan”

Baleg FPKS: Perlu Aturan yang Komprehensif Mengatur Semua Tindakan Kejahatan Seksual

KUTIPAN

Jakarta (07/03) — Anggota Badan Legislatif DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menyoroti tingginya kasus kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.

Kurniasih mengatakan, tingginya kasus kekerasan dalam pacaran bermakna adanya praktik kejahatan yang dilakukan terhadap mayoritas perempuan. Sehingga, papar dia, perlu sebuah aturan yang komprehensif agar ada perlindungan dari segala tindak kejahatan seksual bukan hanya kekerasan seksual.

"Dari laporan Komnas Perempuan tentang kekerasan dalam pacaran berarti tidak kekerasan seksual sering bermula dari tindak kejahatan seksual lainnya. Maka perlu sebuah aturan yang komprehensif untuk semua bentuk kejahatan seksual bukan hanya kekerasan seksual," sebut Juru Bicara PKS ini dalam keterangannya, Kamis

(7/4/2022).

Kurniasih menyebutkan, PKS meminta ada perlindungan secara komprehensif terhadap semua kemungkinan munculnya kejahatan seksual yang bisa menimpa siapa saja terlebih perempuan, baik kekerasan seksual, seks bebas maupun penyimpangan seks. Hal ini senada dengan pandangan F-PKS terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Baleg DPR RI.

Fraksi PKS konsisten untuk memperjuangkan agar dalam RUU TPKS diatur perihal larangan dan pemidanaan terhadap Perzinahan dan Penyimpangan Seksual sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana Kesusilaan.

Sebabnya, semakin marak fenomena kebebasan seksual dalam hal ini perzinahan dan penyimpangan seksual yang sudah terbukti menimbulkan eksekusi buruk di belakang.

"Di sisi lain, kita sangat prihatin dengan semakin maraknya tindakan perzinahan dan gaya hidup seks bebas di kalangan remaja Indonesia yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi. Termasuk ternyata ada banyak tindak kekerasan dalam pacaran sebagaimana dilaporkan Komnas Perempuan. Ini kondisi nyata yang memprihatinkan," kata Kurniasih.

Selain itu, fenomena penyimpangan seksual pun semakin mengkhawatirkan bahkan menyebabkan risiko penularan HIV/AIDS.

"Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penting adanya perlindungan hukum yang juga mengakomodasi norma larangan perzinahan dan penyimpangan seksual disamping kekerasan seksual," pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Badan Legislatif DPR RI

"RUU TPKS, smpi pembahasan terakhir di tingkat I, hanya mengatur tindak pidana kekerasan seksual saja. Karenanya FPKS menyatakan menolak RUU TPKS dilanjutkan pembahasan tahap selanjutnya sebelum aturan yang komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan disahkan. Aturan yang dimaksud sudah tertuang di RKUHP yang harusnya segera disahkan sebelum atau setidaknya bersamaan RUU TPKS"

Dinilai Belum Lengkap, Fraksi PKS Tolak RUU TPKS **Sebelum Adanya** Pengesahan RKUHP

KUTIPAN

Jakarta (06/04) — Fraksi PKS DPR RI dengan tegas menolak hasil Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) oleh Panja Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzammil Yusuf yang mewakili Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan.

“Pertama, Fraksi PKS mengutuk keras dan menolak segala bentuk kejahatan seksual, mendukung terhadap upaya-upaya pemberatan pidana termasuk pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual, serta mendukung terhadap upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual,” ungkap Muzammil.

Fraksi PKS, kata Muzammil, sangat menaruh perhatian terhadap upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan

pemulihan terhadap korban kejahatan seksual yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi korban, serta pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.

“Hal ini dibuktikan dengan PKS memiliki lembaga khusus yaitu Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dengan 1000 Konsultasi, yang fokus memberikan advokasi, pendampingan, dan konsultasi yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan jauh sebelum RUU TPKS ini dibahas”, ungkapnya.

Di sisi lain, imbuhnya,

Fraksi PKS juga sangat prihatin dengan semakin maraknya tindakan perzinahan, gaya hidup seks bebas, serta perilaku penyimpangan seksual.

“Sejak awal penyusunan RUU TPKS di Badan Legislasi DPR, Fraksi PKS mendorong agar Rumusan Tindak Pidana dalam RUU TPKS ini memasukkan secara lengkap jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan yaitu segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perzinahan, dan Penyimpangan Seksual, sehingga pembahasan RUU TPKS ini TIDAK menggunakan satu paradigma yaitu Kekerasan Seksual saja,” jelasnya.

Fraksi PKS, lanjut Muzammil, menilai bahwa pembahasan RUU TPKS ini harus dilakukan dengan paradigma berfikir yang lengkap, integral, komprehensif serta pembahasannya dilakukan secara cermat, hati-hati, dan tidak terburu-buru. agar pelaksanaan RUU TPKS

3 “Kedua, Pembentukan undang-undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Kesusilaan, termasuk di dalamnya Kekerasan Seksual,



Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.

Anggota Badan Legislasi DPR RI

“Fraksi PKS sangat menaruh perhatian terhadap upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi korban, serta pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.”

Perzinahan, dan Penyimpangan Seksual harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.

Dalam Pertimbangan Hukumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa diperlukan langkah perbaikan

untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Kesusilaan oleh Pembentuk Undang-undang,” ujar Anggota DPR Dapil Lampung ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Revisi UU PPP dikebut, PKS : Tak Sejalan Dengan Perintah MK Terkait Partisipasi Bermakna Dari Masyarakat

**2 Februari
2022**

Rapat Pleno Penyusunan
RUU tentang Perubahan
Kedua atas UU No.12
Tahun 2011.

**3 Februari
2022**

Rapat Panja
Penyusunan
RUU PPP

**7 Februari
2022**

Disetujui sebagai
RUU Usul Inisiatif
DPR

13 April 2022

Persetujuan Tingkat I,
RUU ini disetujui oleh
8 dari 9 fraksi di DPR.
Hanya Fraksi PKS
yang menolak

7 April 2022

Tahap Pembahasan
dimulai

- "Konsultasi Publik" dalam proses pengkajian (bukan penyusunan/pembahasan), hanya melibatkan pihak-pihak yang mendukung.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Badan Legislatif DPR RI

Seharusnya, DPR dapat menjalankan fungsi legislasi yang telah dijamin konstitusi dengan lebih cermat dan hati-hati karena menyangkut keberlakuan UU dalam waktu yang panjang dan kemaslahatannya bagi masyarakat luas. Jangan sampai revisi ini dilakukan hanya semata-mata dimaksudkan untuk memberikan payung hukum terhadap UU Cipta Kerja



Dinilai Tergesa-gesa dan Kurang Kajian Mendalam, Fraksi PKS Belum Menyetujui RUU PPP

KUTIPAN

Jakarta (13/04) – Anggota Badan Legislatif dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyampaikan pendapat Fraksi PKS terkait RUU Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Raker Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah di Gedung DPR-MPR, Senayan, pada Rabu malam, (13/04).

Dalam kesempatan itu, Ledia menyampaikan bahwa sikap Fraksi PKS tetap belum dapat menyetujui RUU Perubahan Kedua atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

"Fraksi PKS menilai masih diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap substansi perubahan yang akan dilakukan", ujar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI tersebut.

Adapun, terdapat sejumlah catatan kritis yang dibebankan oleh Ledia. Salah satunya ialah

terkait metode omnibus itu sendiri.

Menurutnya, metode apapun yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah bertujuan untuk mereformasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar menjadi lebih baik, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat dan negara, dengan tujuan untuk menyelesaikan problem tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Namun, hal itu belum sepenuhnya terlihat,

seperti kasus UU Cipta Kerja.

"Metode Omnibus Law yang digunakan pada saat pembentukan UU Cipta Kerja mengabaikan kualitas hasil karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dan stakeholders. Upaya untuk akselerasi pencapaian tujuan UU tidak boleh dilakukan dengan menyimpangi tata cara dan pedoman baku yang telah ada. Mahkamah konstitusi bahkan telah menyatakan bahwa terbuka secara hukum bahwa tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar serta menyimpangi sistematisasi pembentukan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ledia juga menyampaikan bahwa untuk menggunakan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, seharusnya memenuhi beberapa prasyarat. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, meningkatkan kualitas legislasi dan melibatkan partisipasi publik.

"Penggunaan metode

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Badan Legislatif DPR RI

“Fraksi PKS menilai masih diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap substansi perubahan yang akan dilakukan”

omnibus harusnya diberlakukan prasyarat, yaitu hanya dilakukan untuk penyusunan peraturan terhadap satu bidang atau satu topic khusus tertentu, telah ditetapkan dalam tahapan perencanaan, tidak dilakukan tergesa-gesa, dan tidak mengabaikan partisipasi publik,” usul Legislator dari

Dapil Jawa Barat I ini. Lebih lanjut, Ledia juga mengutarakan bahwa penolakan Fraksi PKS dikarenakan RUU Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 ini masih memperbolehkan praktik legislasi yang kurang bijak dan berpotensi disalahgunakan. Selengkapnya di fraksi.pks.id

PKS Desak RUU KUHP Disahkan Agar RUU TPKS Tidak Melegalisasi Kebebasan Seks

● KUTIPAN

Jakarta (12/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Al- Muzammil Yusuf melakukan interupsi pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (12/04).

Menurutnya, hingga saat ini tidak satupun RUU yang lengkap mengatur mengenai kesusilaan yang komprehensif, kecuali KUHP.

"RUU yang lengkap mengatur persoalan kesusilaan, terkait dengan free sex (zina), kekerasan seksual dan penyimpangan seksual ialah KUHP yang periode lalu seluruh fraksi telah membahas dan menyepakati namun gagal disahkan karena ada pasal kontroversial. Sampai sekarang belum juga dibahas kembali", tutur Anggota Komisi I DPR RI ini.

Dalam penjelasan lanjutannya, Muzammil menjelaskan bahwa RUU KUHP ialah menyatakan kedaulatan

hukum Indonesia dari hukum penjajah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

"RUU KUHP ini menyatakan kedaulatan hukum bangsa Indonesia terhadap hukum penjajah. Hukum asli penjajah terpampang jelas di KUHP saat ini, misalnya Pertama, dalam KUHP saat ini pasal 284 perzinahan dikenakan manakala salah satu pihak telah menikah dan berzina dengan pihak lain. Tetapi ketika dua-duanya belum menikah, pasal 284 tidak mengakomodir sanksi apapun. Kedua, Pasal 292 membolehkan hubungan sejenis sesama dewasa yang dihukum hanya terhadap anak-anak", jelas Anggota Baleg dari

FPKS tersebut.

Kemudian, Muzammil menegaskan bahwa pengaturan mengenai Zina di Pasal 284 dan Hubungan Sesama Jenis pada Pasal 292 KUHP telah seharusnya diubah berdasarkan putusan MK, akan tetapi menurutnya RUU TPKS tidak berbicara mengenai itu.

"Putusan MK 2017 terkait Pasal tersebut, 4 (empat) Hakim MK setuju yang mana Pasal 284 dan Pasal 292 harus diubah dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sementara 5 (lima) Hakim lainnya tidak menolak, melainkan menyerahkan ke DPR merubah Pasal tersebut. RUU TPKS yang baru disahkan memang menghukum sekeras-kerasnya penjahat kekerasan seksual, tetapi RUU TPKS sama sekali tidak merubah dan tidak berbicara Pasal 284 dan Pasal 292 tersebut", imbuhnya.

Oleh sebab itu, menurut Muzammil, RUU KUHP seharusnya disahkan berbarengan dengan RUU TPKS. Jika tidak, RUU TPKS bisa bermakna sebagai saja/parsial.

"Kekerasan seksual kita tuntut, tetapi jika tidak ada kekerasan seksual tidak ada hukum yang menghukumnya", tegasnya.

Terakhir, Muzammil mengingatkan kepada Pimpinan DPR untuk membuat aturan hukum yang bermanfaat dan sesuai dengan keadilan dan kemanfaatan masyarakat.

"Era pimpinan sekarang



Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.
Anggota Badan Legislasi DPR RI

"RUU yang lengkap mengatur persoalan kesusilaan, terkait dengan free sex (zina), kekerasan seksual dan penyimpangan seksual ialah KUHP yang periode lalu seluruh fraksi telah membahas dan menyepakati namun gagal disahkan karena ada pasal kontroversial. Sampai sekarang belum juga dibahas kembali"

ambilah kesempatan ini, tonggak kedaulatan bangsa untuk mengembalikan hukum bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan norma yang hidup di masyarakat. Kita sahkan dan kita ambil apa yang telah disepakati oleh seluruh Fraksi

pada periode yang lalu, yaitu RUU KUHP dan telah menjadi Carry Over pada periode ini. Tanpa itu RUU TPKS bisa bermakna yang membahayakan, yakni permisif terhadap seksual artinya tanpa kekerasan, hubungan seksual dibolehkan", tutur Muzammil.

Komisi III FPKS: RKHUP Perlu Segera Disahkan untuk Pembaruan Hukum

KUTIPAN

Jakarta (14/04) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil memberikan keterangan dalam PKS Legislative Report saat menghadiri acara Penutupan Masa Persidangan Rapat Paripurna IV Tahun 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kamis, (14/04).

Dalam kesempatan itu, Nasir mengutarakan harapan terutama di Komisi III terkait pembaruan hukum nasional dimana ditandai dengan dilakukannya perubahan terhadap KUHP.

"Karena kita sadar bahwa KUHP kita saat ini adalah warisan dari kolonial dan itu sudah berlaku sejak 1918. Tahun 1963 sudah ada rekomendasi untuk melakukan pembaruan terhadap KUHP kita. Lalu tahun 1964, diluncurkanlah pertama kali RUU KUHP kita", ungkap Nasir

dalam wawancara PKS Legislative Report.

Nasir lanjut mengutarakan bahwa RUU KUHP ini sudah sempat dibahas pada masa sidang lalu, namun sampai hari KUHP tidak jelas aturannya. Oleh sebab itu, ia berharap kepada Pemerintah dan DPR RI untuk membahas lebih lanjut terkait perubahan KUHP tersebut.

"Dengan adanya perubahan itu maka upaya pembaruan hukum nasional ini dapat diterapkan", pungkasnya.



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si
Anggota Komisi III DPR RI

"Karena kita sadar bahwa KUHP kita saat ini adalah warisan dari kolonial dan itu sudah berlaku sejak 1918. Tahun 1963 sudah ada rekomendasi untuk melakukan pembaruan terhadap KUHP kita. Lalu tahun 1964, diluncurkanlah pertama kali RUU KUHP kita"

Hadiri Penutupan Masa Sidang

Ledia Hanifa: Kita Akan Turun Dapil untuk Dengarkan Aspirasi Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (14/04) --- Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menghadiri Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (14/03).

Dalam kesempatan itu, Ledia menyampaikan keterangan dalam PKS Legislative Report terkait pembahasan apa yang akan ada di persidangan. Menurutnya, penutupan persidangan kali ini merupakan finalisasi dari pembahasan kebijakan maupun undang-undang selama periode persidangan IV tahun 2021-2022.

"Penutupan masa sidang biasanya berkaitan dengan apa yang sudah dicapai selama satu masa persidangan, karenanya pembahasan hari ini hanya penutupan saja tidak ada pembahasan lainnya karena

sudah dilaksanakan sebelumnya. Pembahasan terakhir yang baru kemarin adalah pembahasan dana haji dan revisi rancangan undang-undang perubahan ke-2 atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan", ucapnya.

Dengan ditutupnya masa persidangan, tambahnya, maka kegiatan Anggota Legislatif akan bergeser pada reses dapil masing-masing.

Ledia mengungkapkan rencananya terkait kegiatan apa yang akan dilakukan saat masa

reses diantaranya mengevaluasi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan kebijakan terkait kondisi pangan.

"Pada masa reses kita akan melihat kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok, dan bisa menjadi evaluasi kita bersama bahwa kebijakan-kebijakan yang ada seharusnya bisa mensejahterakan rakyat, apalagi ini sudah Ramadan dan menjelang Idul Fitri sehingga ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita untuk menggali lebih dalam terkait kondisi masyarakat dan juga menguatkan mereka agar bisa lebih baik lagi kondisinya dengan kebijakan-kebijakan yang ada", tutup Ledia.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

"Pada masa reses kita akan melihat kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok, dan bisa menjadi evaluasi kita bersama bahwa kebijakan-kebijakan yang ada seharusnya bisa mensejahterakan rakyat, apalagi ini sudah Ramadan dan menjelang Idul Fitri sehingga ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita untuk menggali lebih dalam terkait kondisi masyarakat dan juga menguatkan mereka agar bisa lebih baik lagi kondisinya dengan kebijakan-kebijakan yang ada"



Aleg PKS: Kami Akan Terus Suarakan Terkait Kelangkaan Minyak Goreng

KUTIPAN

Jakarta (14/04) --- Anggota Legislatif Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyampaikan keterangan dalam PKS Legislative Report (PLR) saat menghadiri acara Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Kamis (14/04).

Dalam penjelasannya, kelangkaan minyak goreng masih menjadi isu yang hangat di tengah masyarakat. Kelangkaan minyak goreng ini menunjukkan betapa tidak berdayanya negara ini dalam menghadapi mafia minyak goreng.

"Sebentar saat rapat paripurna ini, Saya akan angkat agar mengingatkan, bahkan mau tagih janji pimpinan yang waktu itu berjanji memanggil paksa menteri perdagangan yang tidak pernah mau dipanggil oleh DPR. Karena ke depan pada masa sidang berikutnya, kita harapkan ada

pertemuan dengan menteri perdagangan agar kita mendapatkan penjelasan dan kita bisa mengawasi kerja-kerja pemerintah. Pemerintah tidak boleh kalah dengan oligarki," terangnya saat diwawancarai dalam PLR.

Lebih lanjut, Johan menyampaikan bahwa isu yang akan dibawa ke daerah pemilihan saat masa reses berlangsung, tidak jauh dari sosialisasi terkait apa yang telah dikerjakan oleh DPR RI, khususnya yang menjadi komisinya.

"Pertama, saya akan menyampaikan apa yang sudah

kita kerjakan disini. Kedua tentu, karena saya di komisi IV, saya akan banyak berbicara tentang perkembangan harga komoditas yang anjlok, lalu ketidakmampuan pemerintah dalam menyiapkan sarana produksi (saprodi), dan hal-hal yang lain kebutuhan petani, nelayan, dan pekebun. Itu akan menjadi consent saya nanti," paparnya.

Johan juga menambahkan, mengingat saat kunjungan Dapil nanti masih berada dalam Bulan Suci Ramadhan.

"Saya berencana bersama-sama warga akan banyak mengadakan pertemuan dalam konteks buka puasa bersama, agar dapat lebih menyapa dan mendekatkan diri dengan masyarakat," tutup Johan.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

"Saat rapat paripurna ini, Saya akan angkat agar mengingatkan, bahkan mau tagih janji pimpinan yang waktu itu berjanji memanggil paksa menteri perdagangan yang tidak pernah mau dipanggil oleh DPR. Karena ke depan pada masa sidang berikutnya, kita harapkan ada pertemuan dengan menteri perdagangan agar kita mendapatkan penjelasan dan kita bisa mengawasi kerja-kerja pemerintah. Pemerintah tidak boleh kalah dengan oligarki



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

Selenggarakan Lomba Nyanyi Mars PKS dalam Rangka Milad, HNW Beberkan Makna Syairnya

KUTIPAN

Jakarta (06/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid, menyelenggarakan lomba menyanyikan Mars Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di daerah pemilihannya, di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, dan berharap agar mars baru ini dapat disosialisasikan dan diinternalisasikan.

HNW sapaan akrabnya mengatakan di tengah kekhawatiran terhadap kondisi bangsa, seperti semakin parahnya pemberontakan di Papua, kekhawatiran adanya penyerobotan kedaulatan bangsa di Natuna, dan adanya upaya tidak menghormati konstitusi, PKS memang telah menghadirkan semangat baru dengan logo dan mars sebagai upaya dalam memberi pencerahan kepada bangsa.

“Logo PKS sekarang kan baru. Walau warnanya tetap putih, tetapi ada warna oranye yang lebih cerah. Harapannya tentu akan lebih mencerahkan.

Dan itu bukan logo saja, tetapi juga adanya komitmen di dalam Mars PKS yang dihadirkan bersama dengan logo tersebut,” ujarnya saat membuka Lomba Menyanyikan Mars PKS di Jakarta, Minggu (04/04/2022).

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mengatakan apabila diresapi secara mendalam, syair-syair yang terdapat mars tersebut bermakna luar biasa. Ia menuturkan bahwa lirik pertama dari Mars PKS adalah “Dalam Naungan Ridho Ilahi”.

“Lirik ini adalah penegasan bahwa semuanya berangkat dari Ridho Ilahi,” tukasnya.

Lalu, setelah itu ada lirik, ‘Marilah Kita Terus Berjuang’. HNW menjelaskan bahwa ungkapan ini adalah untuk mengajak semua pihak, terutama para kader PKS untuk terus berjuang dan tidak berpangku tangan.

Selanjutnya, ada lirik, ‘Dalam Bhineka Tunggal Ika’. HNW menegaskan bahwa PKS sangat menerima segala bentuk keragaman atau kebhinekaan.

“Kami percaya bahwa kebhinekaan itu untuk memperkuat NKRI. Jadi, dalam kebhinekaan dapat dilakukan kerja sama antar berbagai pihak,” tukasnya.

Lalu, bait pertama lirik mars PKS tersebut ditutup dengan, ‘Merajut Harmoni Bangsa’. HNW juga menegaskan bahwa adanya kekhawatiran Indonesia akan dipecah belah, berupaya dihilangkan, dengan ajakan untuk sama-sama merajut harmoni bangsa. “Ini juga menjadi salah satu komitmen PKS,” ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

“Logo PKS sekarang kan baru. Walau warnanya tetap putih, tetapi ada warna oranye yang lebih cerah. Harapannya tentu akan lebih mencerahkan. Dan itu bukan logo saja, tetapi juga adanya komitmen di dalam Mars PKS yang juga dihadirkan bersama dengan logo tersebut”





Hadiri Diklat Pengelola Majelis Taklim,

Anis Byarwati Tekankan Pentingnya Konsep Diri bagi Dai'yah

KUTIPAN

Jakarta (07/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur, Anis Byarwati, menghadiri Diklat Pengelola Majelis Taklim yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim FORSITMA Jakarta Timur, Ahad, (03/04/2022).

Acara yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi Majelis Taklim (FORSITMA) DPD PKS Jakarta Timur ini berlangsung secara hybrid dan dihadiri oleh sekitar 100 Ustadzah/Pengelola Majelis Taklim dari berbagai wilayah di Jakarta Timur.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua PUI DKI Jakarta, Ustad Gunadi, FKMT Jakarta Timur, Ustadzah Misani Rismiyati, Dan segenap pengurus FORSITMA Jakarta Timur.

Pada kesempatan tersebut, Anis menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan tema bertajuk Peran dan Konsep Diri Seorang Dai'yah.

"Peran seorang dai'yah adalah mengkokohkan basis sosial masyarakat dengan

berdakwah dan terus bergerak menyampaikan nilai-nilai Islam," ungkap Anis.

Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan, Indonesia merupakan sebuah negara yang besar, untuk itu perlu adanya empat basis yang diperkuat secara seimbang agar dapat mengelola negara dengan baik.

Jika digambarkan secara piramida, basis paling bawah adalah basis sosial yang paling luas, menyangkut seluruh lapisan dan elemen masyarakat sosial. Kemudian di atasnya yang menjadi salah satu lapisan yang berperan penting adalah basis operasional yang di dalamnya terdapat tokoh masyarakat, aktivis masyarakat, tokoh agama, dai'yah, ustadzah,

LMK, Karang Taruna, dsb.

"Dai'yah wajib menyiarkan dakwah ke setiap unsur dari berbagai lapisan masyarakat, agar bangunan masyarakat Islam tegak utuh, sehingga kita semua dapat mewujudkan implementasi ajaran Islam dalam kehidupan, itulah peran utama dai'yah", ungkapnya.

Lebih lanjut, Anis yang juga merupakan Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan menjelaskan, pentingnya mengkokohkan basis sosial masyarakat yang menjadi tujuan dai'yah, diantaranya adalah sebagai perluasan eksistensi dan daya tarik dakwah, sebagai penopang rizki dakwah, dan sebagai dukungan suara politik dakwah, agar mempercepat pembentukan masyarakat Islami.

Kemudian, menurut Anis konsep diri seorang dai'yah dapat dibangun dengan 4 hal, yaitu memiliki keimanan yang mendalam, memiliki sifat etika keimanan diantaranya pengorbanan, kesabaran, kejujuran, tidak mudah goyah dengan janji-janji menyesatkan, dll, serta berpegang teguh (istiqomah) dalam dakwah dan



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Adapun untuk membentuk jati diri da'iyyah yang kokoh, maka kita mulai dari diri sendiri. Dengan belajar, ibadah, dan mujahadah (bersungguh-sungguh). Kemudian kita pilih lingkungan yang mendukung, serta bisa mengimplementasikan apa yang kita miliki. Agar masyarakat dapat merasakan seluruh cinta dan semangat yang kita miliki

mampu menjadi rujukan masyarakat.

"Kesuksesan seorang dai'yah akan diraih manakala ia bisa menempatkan diri menjadi bagian utuh dari masyarakat. Melalui kepribadian dai'yah yang dibangun dengan konsep

diri tersebut, maka masyarakat akan mengenalnya, simpati padanya, serta akan cinta dan mendukung perjuangannya", tutur Anis. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Awali Ramadhan, Nevi Zuairina Sebar Ribuan Makanan Berbuka di Dapil

KUTIPAN

Padang (11/04) --- Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mengikuti instruksi untuk berkontribusi menyebarkan 2 juta paket takjil dan sahur, di daerah pemilihannya ia menyebarkan ribuan paket makanan berbuka puasa di daerah pemilihannya.

Titik awal pembagian dimulai Nevi di berbagai daerah Kabupaten kota Dapil Sumatera Barat II.

"Alhamdulillah pembagian awal berjalan lancar, bersama teman dan sahabat-sahabat Nevi Zuairina yang tergabung dalam relawan PKS telah menyebarkan paket makanan berbuka puasa. Kami berusaha memberikan makanan berbuka ini pada orang-orang yang tepat, yakni masyarakat yang tidak sempat mendapatkan makanan pada saat berbuka dan juga ke rumah-rumah yang menurut database kami benar-benar sangat membutuhkan", tutur

Nevi.

Politisi PKS ini menerangkan, selain pembagian paket berbuka puasa yang dilakukan langsung oleh team relawannya, juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan penghafal Qur'an.

"Karena lembaga seperti ini dalam bulan Ramadhan ini mengadakan kegiatan Tebar Keberkahan berupa tebar Takjil Berbuka Puasa bersama para penghafal Al-Qur'an," ujar Nevi.

Nevi mengatakan, ia juga mempersiapkan Tebar paket takjil berbuka puasa ini akan dilakukan kepada masyarakat

hingga akhir ramadhan. Moment ini sekaligus silaturahmi seluruh tim sahabat Nevi untuk beraktivitas secara menyeluruh. Dengan banyak kegiatan di bulan Ramadhan ini, akan menambah amalan sosial yang akan menguatkan rasa kebersamaan baik sesama tim maupun dengan masyarakat.

"Untuk kali ini, tebar paket berbuka puasa kami usahakan sendiri pengadaan maupun pendanaannya. Kedepannya, saya berharap dapat menggandeng lembaga-lembaga yang memiliki pendanaan cukup untuk peruntukan program seperti ini. Dengan demikian, selain ada peningkatan kualitas, juga akan memperluas area pembagian karena ada peningkatan jumlah yang sangat signifikan", tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Untuk kali ini, tebar paket berbuka puasa kami usahakan sendiri pengadaan maupun pendanaannya. Kedepannya, saya berharap dapat menggandeng lembaga-lembaga yang memiliki pendanaan cukup untuk peruntukan program seperti ini"



Bantu Kesulitan Masyarakat, Rofik Hananto dan BPKK Gelar Grebek Sembako PKS di Dapil

KUTIPAN

Purbalingga (11/04) --- Untuk membantu kesulitan masyarakat dalam mendapatkan sembako murah, Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto bekerjasama dengan BPKK PKS menggelar Grebek Sembako PKS.

Di titik ke 3 Minggu (10/04/2022) kegiatan diadakan di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja. Giat sosial itu langsung diserbu masyarakat yang didominasi kaum ibu. Mereka membeli sembako harga murah yang disubsidi oleh Rofik Hananto.

"Harganya murah. Belanjane murah. Saya senang. Terima kasih Pak Rofik Hananto. Kalau bisa diadakan lagi acara ini," kata sejumlah ibu usai belanja sembako murah.

Harga sejumlah komoditas disubsidi oleh Rofik Hananto. Minyak goreng 1 liter dari harga Rp 25.000 menjadi Rp 18.000. Gula pasir 1/2 kg dari Rp 7.000 menjadi Rp 4.000. Mi Instan dari Rp 2.500/bungkus menjadi

Rp 1.000. Beras 1 kg dari Rp 10.000 menjadi Rp 6.000.

Kemudian bawang bawang putih 1/4 kg dari Rp 8.000 menjadi Rp 5.000. Dan bawang merah 1/4 kg dari Rp 8.000 menjadi Rp 5.000. Selain sembako, juga dijual pakaian layak pakai.

Kepala Desa Kedungjati Suwondo menyampaikan terima kasih kepada Rofik Hananto dan BPKK PKS yang sudah mengadakan kegiatan tersebut di wilayahnya.

"Sekali lagi terima kasih sudah mengadakan Grebek Sembako PKS di Desa Kedungjati," katanya.

Anggota FPKS DPRD Purbalingga Aris Widiarso yang hadir pada kegiatan ini

mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara BPKKK PKS Kabupaten Purbalingga dengan Rofik Hananto Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.

"Sudah banyak program aspirasi yang dilakukan Bapak Rofik Hananto di dapilnya. Seperti penerangan jalan tenaga surya, bidang pertanian. Semoga kehadiran beliau Bapak Rofik bisa menambah keberkahan dan kesejahteraan warga Kedungjati," katanya.

Pengurus BPKK DPD PKS Purbalingga Niken Indriangsih mengatakan, di BPKK ada Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Di RKI ini ibu-ibu bisa curhat dan mendapatkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi.

"Kenapa ibu-ibu dan keluarga harus kuat? Karena keluarga itu pondasi negara. Ibu juga adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga ibu-ibu harus bahagia. Caranya adalah dengan banyak bersyukur dan senyum," kata Niken. Grebek Sembako PKS ini



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Ini merupakan upaya kami dalam membantu masyarakat di tengah naiknya berbagai kebutuhan pokok masyarakat, kami berharap Langkah ini dapat sedikit membantu mereka apalagi di tengah bulan Ramadhan dan menjelang idul fitri"

digelar selama Ramadhan 1443 H di beberapa titik di Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara.

"Ini merupakan upaya kami dalam membantu masyarakat di tengah naiknya

berbagai kebutuhan pokok masyarakat, kami berharap Langkah ini dapat sedikit membantu mereka apalagi di tengah bulan Ramadhan dan menjelang idul fitri," kata Rofik

Anggota FPKS Desak Pemerintah Konsisten Wujudkan Kedaulatan Pangan

KUTIPAN

Padang (09/04) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, mendesak Pemerintah untuk konsisten dan punya komitmen mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

Menurut Hermanto, Kedaulatan pangan harus jadi agenda besar bagi Pemerintah dalam pertemuan G-20 Oktober mendatang di Bali.

"Kedaulatan pangan merupakan kemandirian bangsa Indonesia untuk menentukan politik pangan dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan daya dukung elemen bangsa yang bergerak pada sektor pangan yaitu pertanian, kelautan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan dengan memproduksi produk pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia," papar Hermanto dihadapan peserta seminar nasional Optimalisasi Potensi Pangan untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertanian

Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LEMI - PB HMI) di Jakarta.

Komitmen Pemerintah, lanjutnya, dibutuhkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan guna mengatasi masalah kelangkaan dan kenaikan harga pangan yang sering muncul belakangan ini akibat permainan pasar oleh para oligar dan masuknya produk pangan impor kedalam sistem pasar dalam negeri yang merugikan petani dan nelayan.

"Negara harus kuat melindungi petani dan nelayan melalui regulasi dan kebijakan dari dominasi para oligar yang mempengaruhi harga pasar yang cenderung merugikan

petani, nelayan dan masyarakat," tandas legislator dari FPKS DPR RI ini.

Menurut Hermanto, instansi Pemerintah dan elemen pendukung mesti melakukan sinergi dan konsolidasi guna mengatasi alih fungsi lahan, perubahan iklim, teknologi pertanian dan sumber daya manusia.

"Disamping itu, Pemerintah harus tegas melakukan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan penimbunan dan penahanan masuknya produk pangan ke pasar," tuturnya.

Menjelang Pertemuan Negara G-20 Oktober yang akan datang, kata Hermanto, sangat penting bagi Pemerintah untuk mendeklarasikan bahwa bangsa Indonesia betul-betul telah nyata mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

"Hal tersebut bisa menjadi narasi yang ditawarkan untuk disepakati sebagai kebijakan pangan global bagi negarane-negara G-20," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Kedaulatan pangan merupakan kemandirian bangsa Indonesia untuk menentukan politik pangan dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan daya dukung elemen bangsa yang bergerak pada sektor pangan yaitu pertanian, kelautan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan dengan memproduksi produk pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia"

Sidak SPBU di Dapil, Diah Nurwitasari Dengarkan Keluhan Rakyat terkait Naiknya Harga BBM

KUTIPAN

Kabupaten Bandung (06/04) --- Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, melakukan kunjungan ke SPBU Al-Ma'soem untuk mengetahui secara langsung efek kenaikan harga pertamax dan isu langkanya BBM solar yang terjadi belakangan ini.

SPBU ini dipilih Diah, karena berada dekat kawasan industri yang ada di Kabupaten Bandung.

"Menurut pantauan tim saya di lapangan, SPBU ini besar dan sering menjadi tempat pengisian solar kendaraan-kendaraan besar dari pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya. Juga karena tempat antrian motornya terpisah, rapih dan mampu menampung antrian yang panjang. Oleh karena itu saya memilih SPBU ini untuk mengetahui beberapa hal dari masyarakat secara langsung," ucap Diah menuturkan alasannya.

Sebelum ke tempat pe-

ngisian BBM, Aleg perempuan yang akrab disapa Teh Diah ini menemui manajemen SPBU.

Menurut penuturan manajemen SPBU, saat ini pasokan masih normal walaupun ada kalanya dalam momen tertentu kadang pasokannya dibatasi.

"Kadang kami suka dikitir Bu, maksudnya dibatasi pasokannya. Tapi sampai saat ini pasokan pertalite, pertamax maupun solar masih normal," ungkap manajemen SPBU tersebut.

Diah kemudian bertanya pada sopir mobil box yang sedang mengantri untuk mengisi solar. Supir itu

mengungkapkan sulitnya mendapatkan solar.

"Sudah dua minggu ini sulit mendapatkan solar, hari kemarin saya mengantri lama sekali di SPBU disalah satu rest area Tol Purbaleunyi. Bahkan minggu kemarin saya pernah dari Bandung sampai Sumedang tak ada satu pun SPBU yang sedia solar, akhirnya terpaksa saya pakai dexlite," ucap supir yang berharap kondisi seperti ini segera berakhir.

Tak cukup sampai disitu, Diah Nurwitasari mencoba berdialog dengan pengguna sepeda motor yang sedang antri pertalite.

"Bapak sudah biasa pakai pertalite?" Tanya Diah. "Kadang pakai pertamax kadang pertalite, tapi setelah harga pertamax naik jadi Rp.12.500 saya lebih memilih pertalite walaupun harus antri panjang seperti ini," ungkapnya.

Petugas pengisi pertalite untuk sepeda motor pun membenarkan kondisi tersebut.

"Mulai tanggal 1 kemarin, antrian motor pengisi pertalite menjadi lebih panjang dari



Dipl.Ing. Hj. **DIAH NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Komisi VII DPR RI

“Yang terdampak bukan hanya kalangan menengah ke atas tapi juga para pengguna pertalite yang notabene di klasifikasikan Pertamina sebagai kalangan menengah ke bawah. Saya harap pemerintah mampu mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.”

biasanya. Mungkin karena banyak yang beralih dari pertamax yang tambah mahal Bu," petugas tersebut menjawab pertanyaan Diah.

Kondisi seperti ini, lanjut Diah, merupakan kondisi umum di sejumlah SPBU setelah adanya kenaikan harga pertamax.

Yang terdampak bukan hanya kalangan menengah ke atas tapi juga para pengguna pertalite yang notabene di klasifikasikan Pertamina sebagai kalangan menengah ke bawah

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Iskan Qolba Lubis Hadiri Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Dapil

KUTIPAN

Padangsidempuan (02/04) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis, menghadiri acara sosialisasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) di dua tempat yaitu Kota Padangsidempuan dan desa Huraba Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kepala Dinas Sosial, Jufri Nasution mengatakan Kegiatan ini terlaksana karena adanya kerjasama antara Balai 'Insyaf' Medan dengan Pemerintah Kota Padang Sidempuan melalui Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan serta dukungan penuh Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis. Balai 'Insyaf' Medan memfokuskan layanan kepada korban penyalahgunaan Napza.

"Pemerintah Kota Padang Sidempuan serius melakukan pembinaan generasi muda bagi penyalahgunaan Napza, menekankan pentingnya membangun karakter generasi muda

sebagai upaya mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, mandiri dan memiliki jiwa wirausaha," ujar Iskan.

Selain itu kepala balai 'insyaf' Medan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh yang dilakukan Iskan selaku Anggota Komisi VIII DPR.

"Kami merasa bangga atas dukungan yang bapak berikan, Karena ini wujud dari bentuk kerjasama kemensos dengan Komisi VIII yang terbukti sangat baik dilapangan. Maka dari itu kita berharap sentra insyaf Medan, bisa bekerjasama lebih baik lagi ke semua elemen dalam menjalankan program2

nya khusus nya bersama Bapak iskan qolba lubis" ungkapnya.

Selain itu, Legislator asal Sibuhuan Dapil sumut II mengungkapkan kepada sluruh peserta yang hadir untuk bersemangat menjalani hidup.

"Beberapa dari kalian disini, ada yang sebagai kepala keluarga, ada seorang anak, bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan kesempatan Taubat seperti ini, terlalu bodoh kalau kita masih melanjutkan aktivitas mengkonsumsi barang haram tersebut, yang pada ujungnya juga akan menyengsarakan hidup kalian semua," tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menyampaikan bahwa Program ini sangat bagus.

"Ikuti acara ini secara seksama, serius dan sungguh-sungguh, akan ada banyak hal nanti yang bisa kalian dapatkan, mulai dari cara hidup sehat dan disiplin sampai nantinya kalian akan diberikan modal usaha, seperti modal usaha jualan sembako, ternak kambing, alat-alat pertanian, dan bantuan bisnis lainnya. Yang jikalau kalian semua



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara II

“Beberapa dari kalian disini, ada yang sebagai kepala keluarga, ada seorang anak, bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan kesempatan Taubat seperti ini, terlalu bodoh kalau kita masih melanjutkan aktivitas mengkonsumsi barang haram tersebut, yang pada ujungnya juga akan menyengsarakan hidup kalian semua”

serius dalam mengembangkannya, insya Allah kalian akan sukses, 5 atau 10 tahun lagi, kalau kalian ketemu saya, jabat tangan saya, dan sampaikan kepada saya bahwa kalian telah menjadi orang yang sukses," pungkas Iskan mengakhiri.

Acara tersebut dihadiri 100 orang dari para pelaku Napza dan mantan pemakai Napza. Diakhiri acara para peserta mendapatkan modal usaha sesuai dengan keinginannya masing-masing.



Live Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



Serap Aspirasi dari KSPSI Soal UU Ciptaker, Aleg PKS: Kami Tolak Sejak Awal!

KUTIPAN

Jakarta (05/04) – Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS, Alifudin dan Mustafa Kamal, menghadiri hari aspirasi dengan audiensi bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan perwakilan DPRD Sumatera Selatan.

Anggota KSPSI, Cecep, mengungkapkan tuntutan pencabutan UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja serta menolak revisi UUD 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diputuskan tanpa ada aspirasi dari masyarakat.

“Atas nama pekerja kami mohon agar aspirasi kami dapat disampaikan. Kami siap memasang badan untuk berjuang kepentingan kami. Kami ingin menyuarakan bahwa serikat pekerja benar-benar menolak undang-undang ini. Kami meminta pemerintah menjamin perlindungan kami sebagai rakyat dan pekerja, undang-undang seharusnya menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat

kerja yang layak” ucap Cecep. Menanggapi hal tersebut Alifudin selaku perwakilan dari Komisi IX menegaskan bahwa sejak awal PKS sudah menolak undang-undang yang memberatkan rakyat. Semakin banyak yang menyampaikan masalah ini secara langsung, sehingga permasalahan ini sudah merupakan tuntutan yang harus dibicarakan dan dikawal secara tegas.

“Kami akan selalu memperjuangkan hak-hak rakyat termasuk serikat pekerja di Indonesia. Kami tidak putus asa karena ini perjuangan, kita akan terus berjuang. Surat tertulisnya harus didokumentasikan untuk kita sampaikan pada sidang nanti bahwa tuntutan ini benar

datangnya langsung dari serikat pekerja” tegas Alifudin.

Lebih lanjut, Mustafa Kamal selaku perwakilan DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan turut memperjuangkan hak-hak rakyat agar bisa disuarakan hingga mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Saya kira masalah ini sangat luas dan dampaknya sangat merugikan pekerja, kami akan komitmen memperjuangkan hak-hak tersebut. Hal yang disampaikan sudah sangat mencakup apa yang memang kita suarakan dari awal terkait undang-undang cipta kerja. Kami siap menindak lanjuti dan mengawal tuntutan ini hingga tuntas” pungkas Mustafa Kamal.



H. ALIFUDIN, S.E.,M.M
Anggota Komisi IX DPR RI

“Kami akan selalu memperjuangkan hak-hak rakyat termasuk serikat pekerja di Indonesia. Kami tidak putus asa karena ini perjuangan, kita akan terus berjuang. Surat tertulisnya harus didokumentasikan untuk kita sampaikan pada sidang nanti bahwa tuntutan ini benar datangnya langsung dari serikat pekerja”



Terima Aspirasi soal Pengelolaan Tembakau dan Konsumsi Rokok, Aleg PKS: Kami Akan Tindaklanjuti!

KUTIPAN

Jakarta (12/04) – Anggota Legislatif dari Fraksi PKS, Hermanto dan Alifuddin, bertemu dengan tim Pusat Kajian Jaminan Sosial Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dalam rangka mendengarkan aspirasi yang dilaksanakan secara luring di gedung DPR RI, Selasa siang, (12/04).

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia menyampaikan aspirasinya terkait dengan upaya pengendalian permasalahan tembakau serta perlindungan kaum muda dari konsumsi rokok. Hal ini ditanggapi secara baik dan terbuka oleh Hermanto.

“Kita tahu keadaan masyarakat kita yang tingkat konsumsi rokoknya sangat tinggi, kita juga tahu bagaimana keadaan dari petani tembakau kita sendiri di Indonesia. Semoga agenda kita hari ini dapat

membuahkan hasil kebaikan”, sambut Hermanto.

Anggota legislatif dari Komisi IV itu meminta apa yang telah menjadi hasil kajian dari tim SKSG UI untuk dapat diberikan, agar nantinya dapat dipertimbangkan dan diolah kembali dalam bentuk kajian yang lebih mendalam.

“Kita sudah mendengarkan presentasi terkait data dan kajian dari teman-teman semua, nantinya data dan bahan ini akan kami kalkulasikan dan kami bawa ke ranah legislasi. Kita juga akan susun strategi terhadap

tembakau dan rokok ini”, ujar Anggota DPR dari Dapil Sumbang tersebut.

Lebih lanjut, Hermanto berjanji bahwa aspirasi ini akan diteruskan dengan mempertimbangkan solusi-solusi yang telah ditawarkan.

“Beberapa aspirasi yang berupa solusi berbagai aspek ini nantinya akan kami kaji lebih mendalam, baik aspek sosial, aspek ekonomi, aspek legislasi, dan aspek kesehatan”, tambah Hermanto.

Ia pun menjelaskan bahwa pembahasan terkait tembakau dan produk rokok ini cukup kompleks dan multi-aspek, sehingga membutuhkan tahapan-tahapan yang cukup panjang.

“Nantinya, untuk pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan isu ini, akan kami bantu distribusikan kepada komisi terkait agar prosesnya lebih cepat. Mengingat, ini memerlukan waktu dan bahasan lintas komisi”, pungkas Hermanto.

Senada dengan Hermanto, Alifudin, Anggota Komisi IX DPR RI dari FPKS menyatakan bahwa sinergitas antar komisi



Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

“Kita sudah mendengarkan presentasi terkait data dan kajian dari teman-teman semua, nantinya data dan bahan ini akan kami kalkulasikan dan kami bawa ke ranah legislasi. Kita juga akan susun strategi terhadap tembakau dan rokok ini”

menjadi penting dalam mengatasi persoalan tembakau dan konsumsi rokok di Indonesia ini.

“Isu akan sama-sama kita perjuangkan, bukan hanya di Komisi IX, tetapi menyangkut juga komisi-komisi lain. Oleh karena itu, kita harus

bersinergi. Mengingat, niat kita baik, yakni melindungi anak muda dari bahaya rokok. Niat untuk mengendalikan generasi muda dari bahaya rokok ini adalah niat yang baik sekali.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Fraksi PKS Serap Aspirasi Yayasan PKBM Sintesa

KUTIPAN

Jakarta (11/04) – Anggota DPR RI Komisi X dari fraksi PKS, Fahmi Alaydroes, menerima secara virtual aspirasi dari Yayasan PKBM Sintesa, Senin siang, (11/04).

"Alhamdulillah, forum aspirasi Fraksi PKS bisa tetap berjalan dan dapat mendengarkan suara, harapan, keluhan dari berbagai kalangan, termasuk hari ini dari yayasan PKBM Sintesa. Saya yang dari Komisi X yang bermitra dengan Kemendikbud Ristek, mudah-mudahan dengan hadirnya aspirasi ini dapat menjadikan kebaikan dan mendatangkan manfaat", sambut Fahmi.

Dalam kesempatan itu, Perwakilan Yayasan PKBM Sintesa, Farid, menjelaskan bahwa poin aspirasi mereka ialah berkenaan dengan murid-murid yang tidak bisa mengikuti ujian dan tidak mendapat ijazah karena melewati batas akhir input data.

"Sejak 2018 kita mengurus izin dan diberikan

September 2021. Desember 2021 terbit NPSN untuk input data siswa. Pada 22 Januari 2022, Dapodik siswa berhasil sinkron. Akan tetapi, kita diberitahu bahwa melewati batas input data yang maksimal ialah 31 Desember 2021. Sehingga pada Maret 2022 kemarin, kita diberitahu tidak bisa ikut ujian dan tidak mendapat ijazah", jelasnya.

Dalam pemaparan lanjutan, Farid menyampaikan bahwa ia bersama rekan yayasan lainnya telah mencoba mencari berbagai macam jalan keluar.

"Sebelum melakukan aspirasi pada saat ini, kami juga telah melakukan aspirasi terhadap dinas pendidikan DKI Jakarta, Biro Dikmental DKI Jakarta dan sebagainya, namun

kewenangan akhirnya ada pada Direktorat PMPK Kemendikbud RI. Kami mohon kepada Fraksi PKS untuk dapat membantu persoalan kami ini", tegas Farid.

Menjawab aspirasi dari Yayasan PKBM Sintesa tersebut, Fahmi mengapresiasi dan menjelaskan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

"Yang dilakukan oleh teman-teman Yayasan Sintesa sudah sangat bagus, melakukan upaya konsultasi dengan dinas-dinas, dan sudah ditempuh, meskipun kewenangan puncaknya ada di Direktorat PMPK Kemendikbud. Ini menjadi catatan kita semua bahwa kepatuhan akan regulasi, sistem dan formal adalah sangat penting", ungkapnya.

Lebih lanjut, Fahmi berjanji aspirasi dari Yayasan PKBM Sintesa akan segera ia tindak lanjut.

"Silahkan berkirim persoalan secara tertulis ke Kami (Fraksi PKS) dan akan kami sampaikan ke Pimpinan Komisi X untuk disampaikan secara langsung ke Kemendikbud RI. Insha Allah semua jalur akan kami tempuh demi kebaikan anak-anak kita di yayasan", tutup Fahmi.



Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed
Anggota Komisi X DPR RI

"Yang dilakukan oleh teman-teman Yayasan Sintesa sudah sangat bagus, melakukan upaya konsultasi dengan dinas-dinas, dan sudah ditempuh, meskipun kewenangan puncaknya ada di Direktorat PMPK Kemendikbud. Ini menjadi catatan kita semua bahwa kepatuhan akan regulasi, sistem dan formal adalah sangat penting"

Terima Aduan dari Calon Pengawas Sekolah Brebes, Aleg PKS: Kebijakan Kemendikbudristek Merugikan!

KUTIPAN

Jakarta (12/04) – Anggota Komisi X DPR RI dari FPKS, Abdul Fikri Faqih menerima kunjungan aspirasi dari Forum Calon Pengawas Sekolah Kabupaten Brebes di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (12/04) pagi.

Kunjungan aspirasi ini dilaksanakan dengan agenda dialog dan audiensi terkait dengan permasalahan Calon Pengawas Sekolah (CPS) di Kabupaten Brebes pasca dikeluarkannya Surat dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nomor 0584/B3/GT.03.15/2022 pada tanggal 2 Maret 2022. Permasalahan ini dimulai dengan adanya hasil peserta Bakal Calon Pengawas Sekolah sebanyak 56 orang yang dinyatakan lolos tes seleksi administrasi dan substansi tingkat TK, SD, dan SMP, tetapi tidak bisa melanjutkan proses

seleksi selanjutnya.

“Kelanjutan proses dari peserta yang sudah lolos ini terhenti dikarenakan adanya kebijakan baru dari pemerintah merupakan pengaturan yang merugikan hak dari peserta yang sudah dinyatakan lolos karena pada pengaturan ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah IX ini memberikan tanggapan bahwa pengaturan baru ini akan memberikan dampak kepada seluruh wilayah di Indonesia, tidak hanya di Kabupaten Brebes saja. Sehingga perubahan ini

nantinya bisa dikomunikasikan dan ditindaklanjuti bersama dengan Dirjen GTK Kemendikbudristek.

“Saya berharap ini bisa diperjuangkan bersama dengan Dirjen GTK Kemendikbudristek dengan memperhatikan bahwa proses lanjutan seleksi ini seharusnya tetap berjalan. Dengan adanya perubahan kebijakan, proses yang sebelumnya sedang berlangsung mestinya tetap harus dihormati. Karena proses ini sudah memiliki landasan hukum, dimana para calon pengawas sudah dinyatakan lulus seleksi,” ungkap Abdul Fikri.

Abdul Fikri juga juga berharap dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh Forum Calon Pengawas Kabupaten Brebes dapat ditindaklanjuti untuk menghasilkan suatu kebijakan yang memberikan nilai kemanfaatan dan keadilan, dalam rangka memperbaiki dan memperjuangkan pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi.



AN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Saya berharap ini bisa diperjuangkan bersama dengan Dirjen GTK Kemendikbudristek dengan memperhatikan bahwa proses lanjutan seleksi ini seharusnya tetap berjalan. Dengan adanya perubahan kebijakan, proses yang sebelumnya sedang berlangsung mestinya tetap harus dihormati

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Terima Aspirasi Kelompok Tani dari Riau, Aleg PKS: Kami Akan Sampaikan ke Pihak Terkait!

KUTIPAN

Jakarta (13/04) --- Anggota Legislatif dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi dan Andi Akmal Pasluddin, bertemu dengan kelompok Tani Indragiri Hulu Riau dalam rangka menerima aspirasi yang dilaksanakan di ruang rapat Fraksi PKS DPR RI, Rabu siang, (13/04).

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari kelompok Tani Indragiri Hulu Riau menyampaikan aspirasinya terkait dengan masalah perzinahan dan kewajib-an pemberian lahan kepada masyarakat oleh perusahaan. Hal ini ditanggapi secara baik dan terbuka oleh Syahrul dan Andi Akmal Pasluddin.

“Alhamdulillah semoga dengan adanya pertemuan aspirasi ini, kepentingan masyarakat dapat di perjuangkan. Kami selaku Anggota Legislatif akan menampung aspirasi tersebut dan kemudian akan meneruskan kepada eksekutif, yang jelas kita tetap berjuang untuk bagaimana merealisasi-

kan hak dari pada rakyat. Terlebih perkebunan dikelola oleh negara bukan hanya untuk kepentingan swasta, tetapi untuk kesejahteraan rakyat hal tersebut merupakan cita-cita pembangunan negara”, Sambut Syahrul Aidi.

Anggota Legislatif dari komisi V itu menambahkan dalam sambutannya bahwa pengusaha-pengusaha swasta masih banyak tidak melibatkan masyarakat. Permasalahan yang ada di Desa Punt Kayu Indragiri Hulu Riau ini salah satu diantaranya, “mudah-mudahan bisa dicarikan solusi dengan Andi Akmal Pasluddin selaku komisi IV untuk dapat

diduk berbicara membahas permasalahan ini dengan Menteri pertanian”, tegasnya.

Senada dengan Syahrul Aidi, Andi Akmal Pasluddin, anggota komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS turut mendengarkan dan menanggapi aspirasi kelompok Tani. Hal ini dikarenakan, permasalahan yang dibawa oleh kelompok tersebut berkaitan dengan komisi IV yang membidangi masalah pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan.

“Sehubungan dengan permasalahan yang ada terkait perkebunan kelapa sawit di riau ini, saya diminta oleh bapak Syahrul Aidi untuk turut mendengarkan aspirasi dari perwakilan kelompok tani Indragiri Hulu Riau ini agar dapat ditampung dan didiskusikan oleh komisi IV”, ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa di komisi IV terdapat Panja (Panitia Kerja) terkait pembahasan kelapa sawit guna agar dapat mengurai benang kusut permasalahan perkebunan sawit terutama di hulu-nya (perkebunan).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

“Saya kira adanya pertemuan ini sangat tepat, kalau nanti memang merugikan dan dirasa perlu penekanan lebih kuat di komisi, mungkin kami juga akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait dengan komisi agar menemui titik terang untuk kedua belah pihak”



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***